

LAPORAN KINERJA INTERIM TW III

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

TAHUN
2022



TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

Penanggung Jawab

Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.

Ketua

Rina Azhariyati, S.Si, Apt

Sekretaris

Adinda ST

Anggota

1. Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt, Ph.D
2. Dra. Arum Prasetyaningtyas, Apt, M.Si
3. Endah Kristiana, S.Si, M.Si
4. Nur Aini, S.Si, M.Sc
5. Wiratmoko Dani Kusuma, S.Si.
6. Ratih Pujilestari, S.Si, M.Biomed.
7. Prima Purnama, S.Farm
8. Mia Riska, S.Si
9. Harianto, S.A.P

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja PPPOMN disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

PPPOMN wajib mengimplemetasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 PPPOMN disusun dengan mengacu pada RENSTRA PPPOMN Tahun 2020-2024 dan telah mengalami reviu pada tahun 2021 yang terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator utama yang diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan dan diuraikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Eselon II Tahun 2022. Laporan ini menyajikan pencapaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi selama satu triwulan, sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas perencanaan dan pencapaian kinerja PPPOMN.

Kami berharap penyajian Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 PPPOMN ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan pada triwulan selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Jakarta, 17 September 2022

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian Sasaran Strategis yang mengacu pada Renstra PPPOMN tahun 2020-2024. Untuk mendukung Sasaran Program tersebut, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).

Sasaran Startegis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tersebut adalah (1) Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN; (3) Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan; (4) Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar; (5) Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan; (6) Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif; (7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN; (8) Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal; (9) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN; (10) Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel.

Pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Pusat Pengembangan pengujian Obat dan Makanan Nasional Pada Triwulan III tahun 2022 dari 16 (tujuh belas) IKU, terdapat 10 (sepuluh) IKU memperoleh kriteria “baik”, 1 (satu) IKU memperoleh kriteria pencapaian “cukup”, dan 5 (lima) IKU dikur pada akhir tahun. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

Kriteria baik $90\% \leq x < 110\%$ yaitu

- ✓ Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium (100,76%)
- ✓ Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN (101,80%)
- ✓ Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan (101,09%)
- ✓ Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan (101,04%)
- ✓ Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar (103,66%)
- ✓ Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu (105,21%)

- ✓ Indeks pelayanan publik PPPOMN (110,93%)
- ✓ Persentase Jejaring pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif (100%)
- ✓ Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal (111,11%)
- ✓ Nilai kinerja anggaran PPPOMN (93,94%)

1. Kriteria cukup $70\% \leq x < 90\%$


- ✓ Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM (83,3 %)

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 PPPOMN memperoleh anggaran APBN sebesar Rp85.957.671.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan, dengan rincian rupiah murni Rp42.329.860.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan PNPB Rp5.501.327.000. (Lima milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan program dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000 ,(tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S-456/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, Total Automatic Adjustment (Tahap I dan II) PPPOMN sebesar Rp12.979.585.000 (Dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Sesuai dengan surat usulan penambahan anggaran terkait kebutuhan belanja pegawai, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mendapatkan tambahan anggaran Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ,sehingga pagu anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjadi Rp. 87.381.187.000,- (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), Realisasi Anggaran Pusat pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sampai dengan triwulan III tahun 2022 sebesar **Rp. 48,993,160,546,-** (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau (56.07%).

Persentase capaian target indikator kinerja PPPOMN Triwulan III Tahun 2022 yaitu antara 83,3 % sampai dengan 111,11 %. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM” disebabkan adanya pemotongan anggaran untuk pengadaan LIMS - Kegiatan uji coba LIMS pada laboratorium obat tidak



terlaksana, indikator kinerja tertinggi pada indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal”, disebabkan karena capaian pada Triwulan III tahun 2022 PPPOMN telah melebihi target tahun 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja PPPOMN pada triwulan III sehingga target tahun 2022 dapat tercapai sesuai target Renstra PPPOMN.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA	3
KATA PENGANTAR	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR LAMPIRAN	11
BAB I - PENDAHULUAN	12
1.1 Gambaran Umum Organisasi	13
1.2 Struktur Organisasi	13
1.3 Aspek Strategis Organisasi	16
1.4 Analisis Lingkungan Strategis	17
1.5 Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul, dan Isu Strategis	20
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Visi, Misi, dan Tujuan	
2.2 Sasaran Strategis	26
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	36
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	37
2.5 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022	38
2.6 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 Capaian Kinerja TW III Tahun 2022	41
3.2 Capaian Kinerja Anggaran TW III Tahun 2022	87
BAB IV - PENUTUP	119
4.1 Kesimpulan	119
4.2 Saran	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bobot Penilaian	34
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022 PPPOMN	36
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 PPPOMN	37
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022	38
Tabel 5. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	40
Tabel 6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut SAKIP PPPOMN 2021	41
Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022	44
Tabel 8. Capaian SKL PPPOMN TW III Tahun 2022	48
Tabel 9. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 1.1	49
Tabel 10. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 1.2	51
Tabel 11. Jumlah Responden SKM Berdasarkan Jenis Layanan	52
Tabel 12. Nilai SKM Tiap Jenis Layanan	52
Tabel 13. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 2.1	53
Tabel 14. Hasil Monev Standar Kemampuan Balai Besar/Balai POM Triwulan 3 Tahun 2022	55
Tabel 15. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 3.1	57
Tabel 16. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 4.1	61
Tabel 17. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 4.2	63
Tabel 18. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai/Balai Besar/Loka POM/Laboratorium Triwulan III Tahun 2022	64
Tabel 19. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 5.1	66
Tabel 20. Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	68
Tabel 21. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 6.1	69
Tabel 22. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 6.2	70
Tabel 23. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 7.1	73
Tabel 24. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 8.1	74
Tabel 25. Bobot Penilaian	76
Tabel 26. Interpretasi nilai SAKIP	76
Tabel 27. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 8.2	78
Tabel 28. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 9.1	80
Tabel 29. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 10.1	82
Tabel 30. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 10.2	83
Tabel 31. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 11.1	87
Tabel 32. Capaian dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan	89
Tabel 33. Capaian Indikator	109
Tabel 34. Capaian Output	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN	16
Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan	18
Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan	19
Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	19
Gambar 8. Peta Strategi Level 2 PPPOMN	26
Gambar 9. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Lampiran 4. Surat penyampaian tambahan automatic adjustment TA 2022

Lampiran 5. Hasil SKM 2022

Lampiran 6. Penilaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, setiap Instansi diwajibkan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, begitu juga dalam reformasi birokrasi salah satu area dari 8 area perubahan adalah area penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Aspek reform dalam program penguatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional adalah penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, dan refocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi, pembangunan aplikasi yang terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran Peta strategis PPPOMN yang telah disusun, serta reuiu Renstra mengacu pada kinerja utama organisasi dan menjadi dasar penentuan kinerja seluruh pegawai sesuai Cascading dan perhitungan kinerja sampai dengan level individu dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Monitoring efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi dilakukan melalui monev yang dilakukan tiap bulan dan triwulan sesuai dengan komitmen pimpinan Pada laporan evaluasi internal bulanan dan triwulan masing masing substansi menyampaikan kendala/hambatan atas pelaksanaan program, kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi, dan tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi sebelumnya. Pada akhir tahun sesuai dengan amanat peraturan, PPPOMN menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis sesuai dengan peta strategis yang tertuang dalam Reuiu Renstra 2020-2024.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan di perbaharui dengan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
- pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obatkuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
- pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka jejaring eksternal BPOM di lingkup nasional dan internasional;
- pelaksanaan uji profesiensi dalam lingkup nasional dan internasional;
- pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan

- Obat dan Makanan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembandingan;
 - pelaksanaan administrasi pusat; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

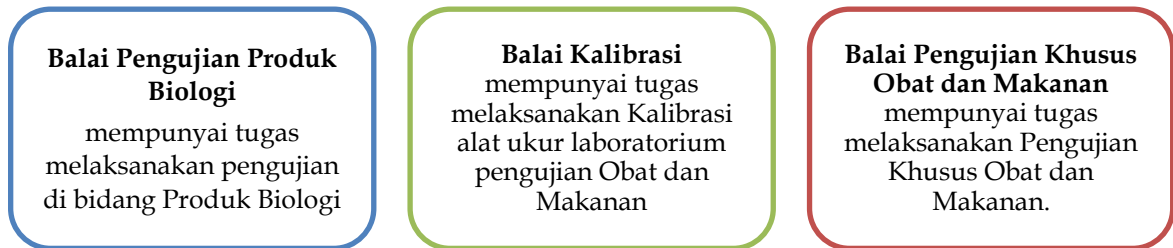
Penjabaran Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2. 12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yaitu Pengelompokan uraian fungsi PPPOMN terdiri atas:

- 1) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi obat dan bahan obat; dan
 - b) Subkelompok substansi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
- 2) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; dan
 - b) Subkelompok substansi kosmetik.
- 3) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia pangan olahan dan air, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi mutu dan gizi; dan
 - b) Subkelompok substansi cemaran, residu, dan bahan berbahaya.
- 4) Kelompok substansi pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat dan suplemen kesehatan; dan
 - b) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat tradisional, kosmetik, dan pangan.

- 5) Kelompok substansi pengembangan baku pembanding, terdiri atas:
- a) Subkelompok substansi baku pembanding obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif dan obat tradisional; dan
 - b) Subkelompok substansi baku pembanding suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan.

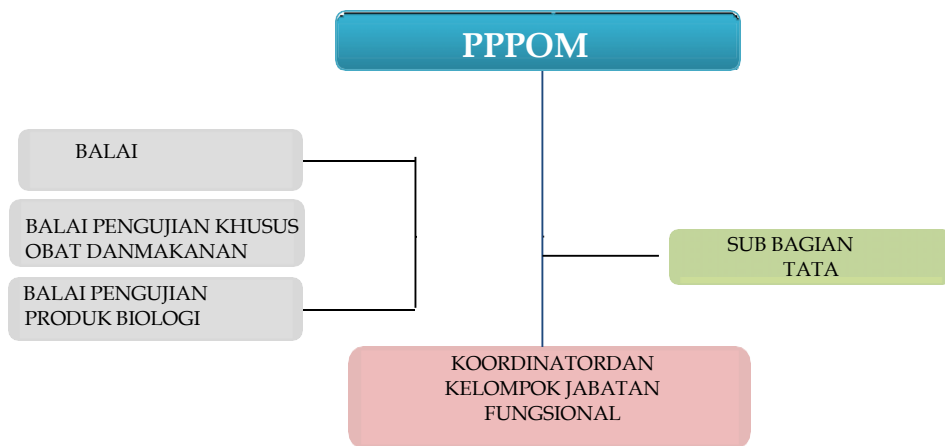
Secara umum, masing-masing Kelompok substansi dikoordinir oleh Koordinator jabatan fungsional. Koordinator tersebut melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Selain itu, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT di lingkungan PPPOMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPPOMN, yaitu:



Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPPOMN dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (eselon 2).

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPPOMN mempunyai 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Struktur organisasi PPPOMN dapat dilihat pada Gambar 1. Sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN

Sumber: Reviu Rencana Strategis PPPOMN Tahun 2020-2024

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, PPPOMN melaksanakan salah satu dari program utama (teknis) BPOM yaitu: **Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan** yaitu:

1. Pengembangan metode analisis kimia, biologi, mikrobiologi, dan biologimolekuler.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan Metode Analisis (MA) baru dan atau memperbaharui MA yang dibutuhkan dalam pengujian obat dan makanan. Validitas MA sangat penting untuk menjamin validitas pengujian, sehingga metode analisis yang dikembangkan PPPOMN dapat berperan dalam pengambilan keputusan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh BPOM. Pengembangan baku pembanding merupakan kebutuhan utama dalam pengembangan MA dan pengujian dengan beberapa MA. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan Baku Pembanding (BP) baru, memproduksi kembali BP. BP yang diproduksi digunakan oleh laboratorium BPOM.

2. Pengujian Obat dan Makanan,

dalam hal ini kegiatan pengujian di PPPOMN dilaksanakan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan untuk pengujian kimia, mikrobiologi dan biologi molekuler atas sampel investigasi, penyidikan, pengkajian, dan rujukan obat dan makanan dalam lingkup nasional dan internasional. Pengujian juga dilaksanakan oleh Balai Pengujian Produk Biologi untuk sampel produk biologi, serta Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif untuk pengujian sampel dalam rangka PreQualification-World Health Organization (PQ-WHO).

3. Pengelolaan alat laboratorium BPOM

mencakup kalibrasi dan pemeliharaan alat, kajian kebutuhan dan pemanfaatan alat.

4. Peningkatan kemampuan laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP melalui penilaian kemampuan setiap laboratorium BB/Balai POM dengan menggunakan tools.

5. Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan.

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta laboratorium eksternal dalam pengembangan/standardisasi MA dan pengembangan BP. Selain itu, dalam mendukung pemenuhan standar/persyaratan ASEAN dan Internasional, laboratorium PPPOMN terus meningkatkan kapabilitas pengujian melalui keikutsertaan dalam pertemuan dan uji profesiensi/kolaborasi. Kedepannya kegiatan yang melibatkan laboratorium eksternal, industri obat dan makanan akan ditingkatkan sebagai upaya meminimalisir dispute/kesenjangan hasil pengujian dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi laboratorium pengujian di Indonesia. Penguatan laboratorium BPOM akan dilakukan melalui peningkatan lingkup pengujian produk biologi, perbaikan manajemen laboratorium seperti regionalisasi dan spesialisasi laboratorium.

6. Penataan proses bisnis dan peningkatan jenis layanan Publik berbasis elektronik.

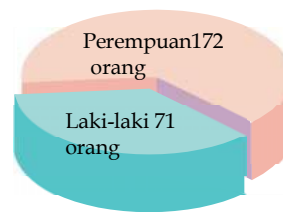
Kegiatan ini untuk memudahkan layanan internal PPPOMN, BPOM dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik PPPOMN. Peningkatan pemenuhan standar mutu ISO, merupakan perwujudan komitmen PPPOMN untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder/masyarakat pengguna layanan PPPOMN khususnya terkait layanan penyediaan baku pembanding kimia dan uji profesiensi. Hal-hal yang belum terakomodir dalam kedua standar ISO yang telah diterapkan (ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017), tata kelolanya akan lebih diperhatikan dengan penerapan standar ISO/IEC 17034 dan ISO/IEC 17043.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPPOMN sampai akhir Juni 2022 didukung oleh 182 orang PNS dan dibantu pramubakti sebanyak 61 orang. Profil pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan, tingkat pendidikan dan umur dapat dilihat seperti pada gambar berikut.

- Berdasarkan jenis kelamin:



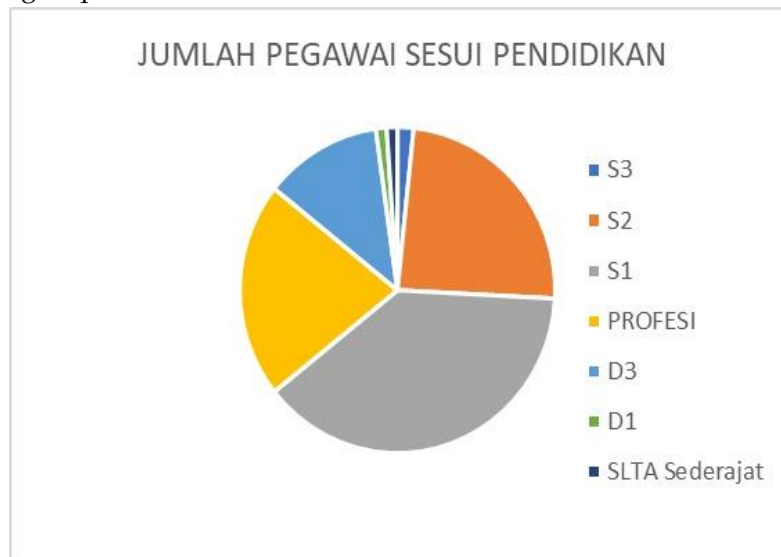
Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

- Berdasarkan golongan: Golongan IV



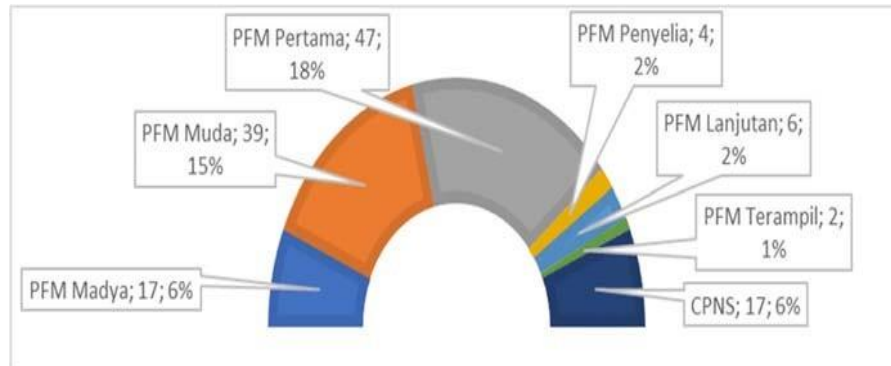
Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan

- Berdasarkan tingkat pendidikan



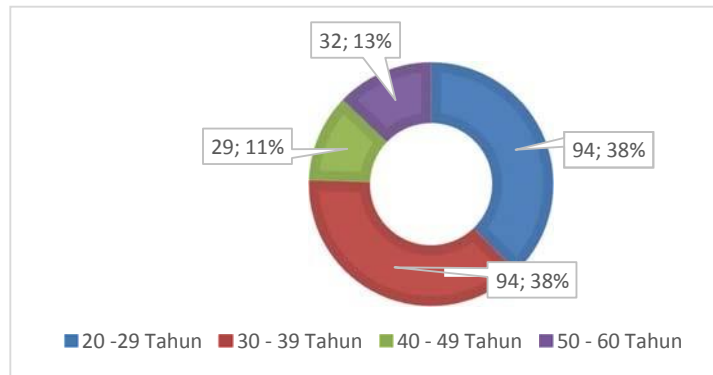
Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Berdasarkan jabatan:



Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan

- Berdasarkan kelompok umur:



Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

Anggaran

PPPOMN memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.957.671.000,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dalam kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. dengan rincian rupiah murni untuk program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp42.329.860.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), PNBPN Rp5.501.327.000 (Lima milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan program dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000 (tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S-456/MK.02/2022 tentang Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, *Total Automatic Adjustment* (Tahap I dan II) PPPOMN sebesar Rp12.979.585.000 (Dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan penambahan anggaran terkait kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga

pagu anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjadi Rp. 87.381.187.000 (Depalan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) .

1.6 Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul, dan Isu Strategis

1.6.1 Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal pada Reviu Rencana Strategis PPPOMN tahun 2020-2024, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BPOM kedepan yaitu:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produksi di bidang obat dan makanan menciptakan berbagai jenis dan inovasi produk, seperti bioteknologi (monoklonal anti bodi)/protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); pengembangan probiotik (sebagai obat penyakit lifestyle, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim), kosmetik, nanoteknologi; targeted organ medicine; blood product dan sel punca dan berbagai bahan berbahaya dan cemaran dalam kosmetik dan pangan.
2. Perubahan *lifestyle* masyarakat sehingga konsumsi suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang mungkin saja tidak jelas perolehannya sehingga mutu dan keamanannya diragukan.
3. Masih adanya produk yang mutunya rendah seperti adanya cemaran mikroba, bahan kimia obat dalam obat tradisional sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
4. Masih adanya permintaan penjelasan oleh pelaku usaha terhadap hasil pengujian BPOM.
5. Perjanjian-Perjanjian Perdagangan Internasional di bidang obat dan makanan. Menipisnya *entry barrier* perdagangan antar negara serta era perdagangan bebas dunia semakin membuka akses pasar produk obat dan makanan dalam negeri.
6. Program Sustainable Development Goals (SDGS): Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.
7. Program SDGS tujuan 2: Tanpa kelaparan. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berda dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Laboratorium BPOM harus ikut serta dalam mencapai tujuan ini, yaitu

mengawal dan menjamin keamanan makanan dengan hasil pengujian yang cepat, tepat dan sesuai. Program SDGS tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Air yang digunakan untuk minum dan masak kualitasnya harus diperhatikan, tidak boleh menjadi sumber penyakit atau membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya. Kualitas air yang digunakan masyarakat terutama air minum harus dapat dijamin keamanannya yang dapat dibuktikan melalui hasil pengujian.

8. ASEAN Health Cluster 4 Ensuring Food Safety. Salah satu program strategis ASEAN Health Cluster 4 Ensuring Food safety pada kegiatan monitoring dan *surveillance* adalah Strengthening laboratory capacity for food safety including the possibilities using ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL).
9. Ketersediaan Baku Pembanding belum memadai. Ketersediaan baku pembanding dari PPPOMN sangat diharapkan oleh industri obat dan makanan agar lebih terjamin mutu dengan harga relatif lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan impor.
10. Tuntutan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola proses bisnis, seperti kemudahan akses data dan informasi yang dibutuhkan internal PPPOMN dan dukungan layanan publik secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat terhadap layanan publik.

1.6.2 Isu Strategis

Dalam Renstra PPPOMN 2020-2024, PPPOMN telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi PPPOMN dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang dalam Renstra PPPOMN tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pandemi COVID-19

Potensi: PPPOMN merupakan satu-satunya laboratorium di Indonesia yang diakui WHO dalam melakukan lot release/pengujian vaksin. Dengan demikian, kondisi pandemi menjadi

tantangan PPPOMN untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan pengujian keamanan dan mutu vaksin COVID-19 yang sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Peran PPPOMN dalam pengujian biomolekuler sangat dibutuhkan untuk mengawal pengujian spesimen COVID-19. PPPOMN juga melakukan pendampingan kepada Balai Besar/Balai POM dan mendorong agar mampu melakukan pengujian spesimen COVID-19.

Permasalahan:

- Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi PPPOMN masih sangat terbatas untuk menjawab tantangan era pertumbuhan ekonomi saat ini dengan masuk dan beredarnya vaksin COVID-19 dengan berbagai platform dari luar negeri yang sangat cepat.
- Sulitnya dilakukan pengawalan terhadap pengembangan vaksin di Indonesia dikarenakan untuk melakukan transfer teknologi harus ada perjanjian Kerjasama antara importir/industri vaksin di Indonesia.
- Meningkatnya produksi dan peredaran obat COVID-19, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan vitamin yang diklaim dapat mengobati COVID-19 membutuhkan peran PPPOMN dalam mengembangkan metode analisis dan pengujiannya.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

PPPOMN diharapkan peran sertanya dalam mendukung dua area reformasi Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yaitu:

- Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi".
Kontribusi PPPOMN pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas, antara lain pengembangan metode analisis obat dan vaksin COVID-19 serta lot release vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV).
- Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (Health Security)", khususnya dalam hal penguatan jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi PPPOMN pada area ini antara lain penguatan kapasitas dan kemampuan uji laboratorium BPOM terutama dalam menjawab tantangan isu strategis antara lain pengujian obat kanker, obat dengan sistem penghantaran khusus, pengujian residu dan kontaminan termasuk bahan dilarang dalam pangan dan kosmetik, negative list dalam obat tradisional, pengujian senyawa marker dalam obat herbal Indonesia khususnya fitofarmaka, jenis dan jumlah Baku Pembanding, peningkatan kapasitas SDM penguji, implementasi Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan, pemenuhan sarana prasarana

laboratorium pengujian Obat dan Makanan, pengembangan ruang lingkup kalibrasi peralatan laboratorium, serta peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

Selain melaksanakan pengujian Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) specimen COVID-19, Laboratorium BPOM meningkatkan kontribusinya melalui pengujian Whole Genome Sequencing (WGS) untuk surveilans virus SARS-COV-2 dan pengujian SGTF untuk identifikasi Probable Omicron.

PPPOMN ditetapkan sebagai salah satu dari 4 laboratorium di DKI Jakarta yang mampu melaksanakan pengujian subvarian SAR-COV-2 selain Laboratorium Pusat Kebijakan Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Genomic Solidaritas Indonesia (GSI) dan FKUI.

Permasalahan:

- 1) Kemampuan laboratorium pengujian Obat dan Makanan belum sepenuhnya mendukung pengawasan keamanan dan mutu produk beredar di Indonesia, terutama dengan munculnya berbagai isu strategis antara lain pengujian obat kanker, obat dengan sistem penghantaran khusus, pengujian residu dan kontaminan termasuk bahan dilarang dalam pangan dan kosmetik, negative list dalam obat tradisional, pengujian senyawa marker dalam obat herbal Indonesia khususnya fitofarmaka, jenis dan jumlah Baku Pembanding, dan isu Obat dan Makanan lainnya. Demikian juga laboratorium pengujian Obat dan Makanan diluar BPOM belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 2) Masih terbatasnya kapasitas laboratorium BPOM karena belum terpenuhinya seluruh sumber daya yang diperlukan untuk penyempurnaan sistem manajemen laboratorium yang andal. Demikian juga dengan kalibrasi peralatan laboratorium yang masih membutuhkan pengembangan kemampuan kalibrasi sejalan dengan semakin meningkatnya jenis dan jumlah peralatan.
- 3) Masih terbatasnya jenis dan jumlah Baku Pembanding Kimia dan Biologi sesuai kebutuhan untuk mendukung pengujian Obat dan Makanan.

C. Regionalisasi Laboratorium

Potensi:

- PPPOMN sebagai sentra laboratorium dari sistem regionalisasi laboratorium BPOM memiliki peran sangat strategis dalam menyusun kebijakan pengujian Obat dan Makanan, menyediakan metode analisis, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem regionalisasi laboratorium, serta memberikan solusi terhadap permasalahan pengujian Obat dan Makanan.

- PPPOMN sebagai Pembina Balai Besar/Balai POM/Loka POM di bidang pengujian Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam penyusunan/revisi Standar Kemampuan Laboratorium sesuai konsep regionalisasi (standar ruang lingkup, standar kompetensi, dan standar peralatan), monitoring dan evaluasi, serta melakukan intervensi pemenuhannya.

Permasalahan:

Berbagai tantangan teknis pengujian Obat dan Makanan yang timbul selama implementasi sistem regionalisasi laboratorium tidak seluruhnya dibawah kendali PPPOMN seperti ketersediaan sarana prasarana/instrument pengujian, dukungan IT, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penguji, dukungan anggaran, dll.,sehingga dibutuhkan peran aktif unit kerja terkait.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Visi PPPOMN sejalan dengan Visi BPOM. Visi, Misi, dan Tujuan BPOM

Visi BPOM 2020- 2024	Misi BPOM 2020- 2024	Tujuan BPOM 2020-2024
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Pada Reviu Renstra 2020-2024 Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Misi dan Tujuan PPPOMN menyesuaikan Misi dan Tujuan BPOM sebagai berikut:

2.1.2 Misi PPPOMN 2020-2024

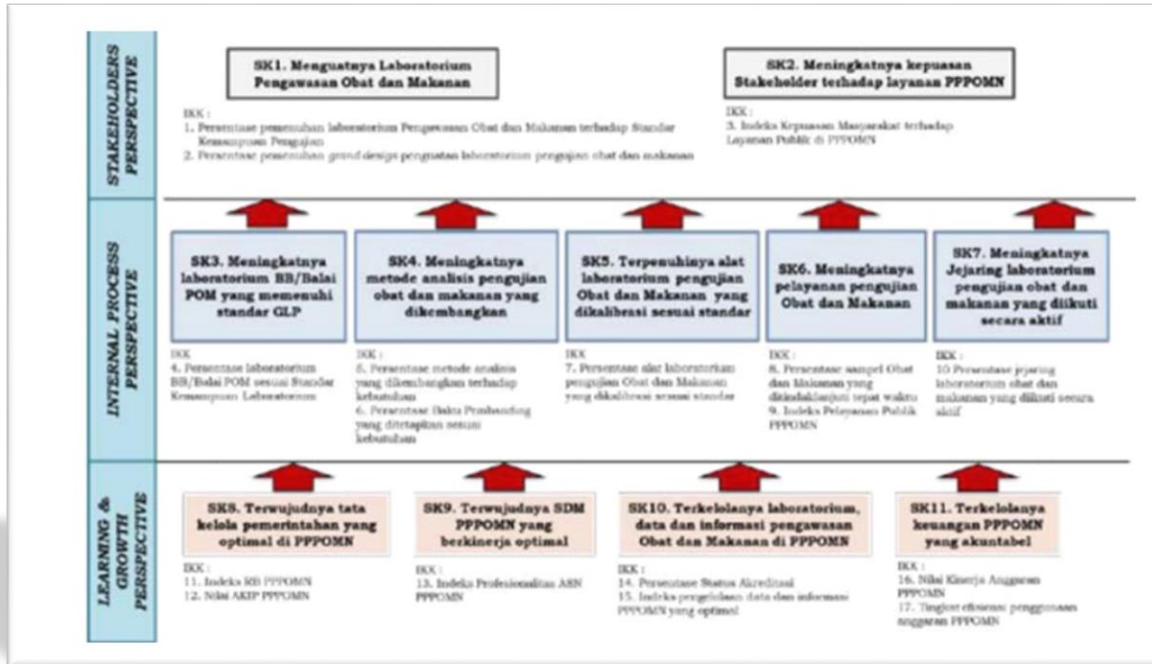
1. Memperkuat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang andal dan kredibel guna perlindungan bagi segenap bangsa.
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang pengujian

2.1.3 Tujuan PPPOMN 2020-2024

1. Meningkatnya kualitas SDM dan kapabilitas laboratorium pengujian Obat dan Makanan menuju standar Internasional.
2. Terwujudnya PPPOMN yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis PPPOMN 2020-2024 disusun berdasarkan peta strategi *balance score card* 3 level perspektif, dengan menurunkan sasaran strategis BPOM perspektif *learning and growth* dan indikatornya ke dalam *stakeholder perspective* peta strategi PPPOMN. Dengan sasaran strategis ini maka PPPOMN akan berkontribusi pada pengawasan Obat dan Makanan. Peta Strategi Level 2 Satker PPPOMN dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 7. Peta Strategi Level 2 PPPOMN
Sumber: *Reviu Renstra PPPOMN 2020-2024*

1. Indikator: Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian*

Definisi Operasional:

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium yang meliputi Standar Ruang Lingkup (RL), Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Penguji.

- SKL PPPOMN digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium PPPOMN dalam melakukan fungsi:
 - Pengembangan metode analisis (MA) kimia dan biologi: obat, bahan obat, NAPPZA; obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik; pangan olahan; dan produk biologi.
 - Pengembangan baku pembanding kimia dan biologi

- Pengujian sampel Obat dan Makanan: obat, bahan obat, NAPPZA; obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik; pangan; produk biologi; dan rokok.
- Kalibrasi peralatan laboratorium.
- b. SKL Balai Besar (BB)/Balai POM digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium BB/Balai POM dalam melakukan fungsi pengujian sampel Obat dan Makanan di laboratorium kimia dan biologi.
- c. Nilai pemenuhan RL BB/Balai POM dihitung berdasar rata-rata Nilai pemenuhan RL pengujian kimia (obat, NAPPZA; obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik; pangan) dan pengujian biologi.
- d. Kecuali RL pengujian obat, Nilai pemenuhan RL BB/Balai POM adalah sbb:
 - BB/Balai POM yang hanya melakukan pengujian dasar maka Nilai Akhir pemenuhan RL adalah 100% capaian Parameter Uji Dasar.
 - BB/Balai POM yang melakukan pengujian spesifik maka Nilai pemenuhan RL Uji Spesifik memiliki bobot 2,5% per penugasan spesifik.
- e. % Pemenuhan laboratorium BPOM terhadap SKL dihitung berdasar rata-rata SKL PPPOMN dengan bobot 40% dan SKL BB/Balai POM dengan bobot 60%.
- f. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian dengan target 90 % pada akhir tahun 2024.

**Standar Kemampuan Pengujian = Standar Kemampuan Laboratorium = Standar GLP*

2. Indikator: Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan

Definisi Operasional:

- a. Grand Design (GD) Penguatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan adalah pedoman dalam merencanakan penguatan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan dimasa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
- b. GD disusun dengan memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator Pengujian Obat dan Makanan sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.
- ❖ Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan dengan target 40% pada akhir tahun 2024

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN

Definisi Operasional:

- a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
 - b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
 - d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).
 - e. Target dinyatakan dalam angka.
- ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN dengan target 93 pada akhir tahun 2024

4. Indikator: Persentase laboratorium BB/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Definisi Operasional:

- a. Pemenuhan laboratorium BB/Balai POM terhadap Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) diperoleh dari hasil asesmen terhadap pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Penguji BB/Balai POM tahun berjalan.
 - b. Jumlah BB/Balai POM yang dilakukan asesment terhadap pemenuhan SKL adalah 34 Balai Besar/Balai POM
- ❖ Persentase laboratorium BB/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target 91 % pada akhir tahun 2024

5. Indikator: Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap Kebutuhan

Definisi Operasional:

- a. Metode analisis (MA) adalah metode pengujian yang dikembangkan oleh PPPOMN (validasi/verifikasi), yang digunakan untuk pengujian kimia obat, bahan obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, produk biologi,

- mikrobiologidan biologi molekuler, pengelolaan hewan percobaan.
- b. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah banyaknya metode analisis kimia dan biologi sesuai kebutuhan pengawasan hingga tahun 2024. Pada awal periode renstra, kebutuhan MA hingga 2024 adalah sebanyak 2289 MA. Di tahun 2020 terjadi penyesuaian target karena pandemi menjadi 2261 MA, dan di 2021 terjadi penyesuaian kembali karena masih kondisi pandemi menjadi 2213 MA.
- ❖ Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan dengan target 100 % pada akhir tahun 2024

6. Indikator: Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan

Definisi Operasional:

- a. Baku Pembanding (BP) terdiri dari BP Kimia dan BP Mikroba dalam bentuk kering.
 - b. BP Kimia adalah BP yang dikembangkan/diproduksi kembali dan dilakukan uji ulang/stabilitas oleh PPPOMN dan Balai Besar POM di Yogyakarta.
 - c. BP Mikroba adalah BP yang diproduksi kembali/dikembangkan oleh PPPOMN.
 - d. BP yang ditetapkan adalah BP kimia dan mikroba yang diperlukan untuk pengujian dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan hingga tahun 2024 yaitu sebanyak 1227 terdiri dari 1122 Sertifikat BP Kimia dan 105 Sertifikat BP Mikroba
- ❖ Persentase Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan dengan target 100 % pada akhir tahun 2024

7. Indikator: Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar

Definisi Operasional:

- a. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan, dalam kondisi tertentu, antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan, dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar. Yang dimaksud alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan adalah alat ukur dan alat penunjang yang digunakan untuk pengujian Obat dan Makanan di laboratorium BPOM.
- b. Ruang lingkup kalibrasi alat ukur pengujian Obat dan Makanan meliputi: gaya massa, volumetrik, suhu, instrumen analitik, tekanan dan laju putar/frekuensi. Yang dimaksud standar adalah ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.

- ❖ Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standard dengan target 100 % pada akhir tahun 2024

8. Indikator: Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu

Definisi Operasional:

- Tepat waktu adalah memenuhi timeline pengujian sesuai Standar Pelayanan Publik BPOM atau sesuai kesepakatan resmi/MoU.
 - Yang dimaksud ditindaklanjuti adalah diuji, dievaluasi, dan dilaporkan dalam bentuk laporan/sertifikat pengujian yang diterbitkan oleh PPPOMN.
 - Yang dimaksud sampel Obat dan Makanan adalah sampel yang diterima PPPOMN untuk pengujian khusus/kasus /uji rujuk/konfirmasi/sampel dari pihak ke tiga dalam rangka pengawasan pre-market dan post-market. Termasuk sampel untuk pelulusan yang diterbitkan berupa dokumen Quality Control setiap batch produksi dari produsen produk biologi yang dikirimkan ke PPPOMN sebelum diedarkan untuk dievaluasi dan diterbitkan sertifikat pelulusan produk.
- ❖ Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu dengan target 95% pada akhir tahun 2024

9. Indikator: Indeks Pelayanan Publik PPPOMN

Definisi Operasional:

- Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - Kebijakan Pelayanan (30%)
 - Profesionalitas SDM (18%)
 - Sarana Prasarana (15%)
 - Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
 - Konsultasi dan Pengaduan (15%)
 - Inovasi (7%)
 - Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- ❖ Indeks pelayanan publik PPPOMN dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024.

10. Indikator: Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti secara aktif

Definisi Operasional:

- a. Jejaring laboratorium Obat dan Makanan adalah wadah kerjasama nasional dan/ internasional laboratorium pengujian Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Kemasan Pangan, Biologi, Baku Pembanding Obat dan Makanan.
 - b. Yang dimaksud berpartisipasi aktif adalah penyelenggaran/keikutsertaan dalam berbagai program/kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan dan bimbingan teknis, workshop, pertemuan/FGD; Uji Profisiensi; Uji Kolaborasi.
 - c. Jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang berpartisipasi secara aktif hingga tahun 2024 adalah 14 jejaring:
 - LRPPPI pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan (2020)
 - LRPPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan (2020)
 - LRPPPI Pengujian Cemaran Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan (2020)
 - LRPPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan (2020)
 - LRPPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan (2020)
 - LRPPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan (2020)
 - APTLC (2021)
 - ACTLC (2022)
 - AFRL for Food Additive (2022)
 - Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (2022)
 - Jejaring Laboratorium Baku Pembanding (2023)
 - Jejaring WHO-National Control Laboratory Network for Biologicals (2023)
 - Jejaring Laboratorium Pengujian Mikrobiologi Obat (2024)
 - Jejaring Laboratorium Obat Tradisional Indonesia (2024)
- ❖ Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif 100% pada akhir tahun 2024.

11. Indikator: Indeks RB PPPOMN

Definisi Operasional:

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

- a. ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c. Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan: bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%
- ❖ Indeks RB PPPOMN dengan target nilai 89,6 pada akhir tahun 2024

12. Indikator: Nilai AKIP PPPOMN

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

PerMenPAN & RB No.88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Keputusan Ka. Badan POM No. 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

Evaluasi AKIP mengacu keputusan Keputusan Ka. Badan POM No. 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang dapat digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP antara lain:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Komponen-komponen tersebut dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen dengan variabel yaitu:

- a. Komponen: terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Kinerja.
- b. Sub-komponen: dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
- c. Kriteria: Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Tabel 1. Bobot Penilaian

Komponen	Sub Komponen			
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pengukuran Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pelaporan Kinerja	2,4	3,6	6	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	100

- ❖ Nilai AKIP PPPOMN dengan target nilai 81,7 pada akhir tahun 2024

13. Indikator: Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN

Definisi Operasional:

- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
 - Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
 - Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
- ❖ Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN dengan target nilai 87,00 pada akhir tahun 2024.

14. Indikator: Persentase Status Akreditasi

Definisi Operasional:

Yang dimaksud status akreditasi adalah predikat yang diberikan oleh KAN atau instansi yang berwenang atas hasil audit penerapan sistem mutu di PPPOMN dengan target hingga 2024:

- ISO 17025:2017

- ISO 9001:2015
- PQ WHO
- WHO NRA Benchmarking5. ISO 17034:2016 (2022) 6. ISO 17043 (2023)
- OHSAS 18001 (2024) Sistem Manajemen untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- ❖ Persentase Status Akreditasi dengan target nilai 100 % pada akhir tahun 2024.

15. Indikator: Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal

Definisi Operasional:

Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal adalah nilai dari :

- a. Persentase data dan informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi BPOM:
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem informasi yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja.
 - Denominator dihitung dari target kinerja/target output yang ditetapkan atau data populasi (jika ada), numerator dihitung dari data kinerja realisasi yang telah diisikan dilaporkan dalam sistem informasi BPOM.
 - b. Persentase pemanfaatan sistem informasi BPOM mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan baik internal maupun eksternal, yaitu email dan dashboard BCC Kriteria baik apabila:
 - Data dan informasi yang disampaikan/dilaporkan sesuai yang ditargetkan.
 - Sistem informasi (layanan TIK) yang dibuat telah dimanfaatkan.
- ❖ Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal dengan target nilai 3(tiga) pada akhir tahun 2024.

16. Indikator: Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

Definisi Operasional:

- a. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berikut 8 indikator pembentuk IKPA:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP

4. Penyelesaian Tagihan
 5. Penyerapan Anggaran
 6. Dispensasi Penyampaian SPM
 7. Capaian Output
 8. Belanja Kontraktual
- ❖ Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN dengan target nilai 96,5 pada akhir tahun 2024.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi unit organisasi dan unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022 PPPOMN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	.Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	81
		.Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan	20
2.	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	91
3.	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar <i>GLP</i>	.Persentase laboratorium BB/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80
4.	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	.Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6
		.Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	81,5
5.	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	.Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100
6.	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	.Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93
		.Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,30
7.	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	0.Persentase Jejaring pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	71
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1.Indeks RB PPPOMN	87,6
		2.Nilai AKIP PPPOMN	78,7
9.	Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	3.Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,25
10.	Terkelolanya Laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	4.Persentase Status Akreditasi	71
		5.Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25
11.	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	6.Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. PK merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan *monitoring* pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. PK disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja eselon II dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 PPPOMN

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Stakeholder	1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	1. Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian	81
		2. Persentase Pemenuhan <i>Grand Design</i> (GD) penguatan laboratorium BPOM	20
Internal Process	2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91
	3. Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP/SKL	80
	4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1.Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6
		2.Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	81,5
	5 Terpenuhinya alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100
	6.Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1.Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93
2.Indeks Pelayanan Publik PPPOMN		4,30	

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	7. Meningkatkan jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	Persentase Jejaring pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	71
Learning & Growth	8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Indeks RB PPPOMN Nilai AKIP PPPOMN	87,6 78,7
	9. Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,25
	10. Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Persentase status akreditasi	71
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25
	11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1

2.4 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun RAPK PPPOMN tahun 2022 sesuai tabel 2.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022				ANGGARAN (RUPIAH)
			B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Standar Kemampuan Laboratorium	76	77	79	81	907.230.000
		2. Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	7	9	12	20	6.039.120.000
2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di PPPOMN	-	-	-	91	3.071.931.000
3	Meningkatnya laboratorium Balai Besar/ Balai POM yang memenuhi standar GLP	4. Persentase laboratorium Balai Besar/ Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	80	3.599.016.000
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	5. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap Kebutuhan	76,45	77,80	79,35	82,60	4.463.566.000
		6. Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai Kebutuhan	72,94	75,22	78,24	81,50	1.844.838.000
5	Terpenuhnya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	25	50	75	100	2.898.800.000
6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	8. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	93	93	93	17.494.800.000
		9. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	-	-	-	4,30	2.776.927.000
7	Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10. Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti secara aktif	50	57	64	71	1.748.069.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022				ANGGARAN (RUPIAH)
			B3	B6	B9	B12	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang optimal di PPPOMN	11. Indeks RB PPPOMN	-	-	-	87,6	24.612.148.000
		12. Nilai AKIP PPPOMN	-	-	-	78,7	753.000.000
9	Terwujudnya SDMPPPPOMN yang berkinerja optimal	13. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	-	-	-	86,25	1.251.174.000
10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	14. Persentase Status Akreditasi	-	-	-	71	497.052.000
		15. Indeks pengelola data dan informasi PPPOMN yang optimal	-	-	-	2,25	4.480.960.000
11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	65	75	85	94,1	9.519.040.000

2.5 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Pengukuran Capaian Kinerja dihitung dengan menggunakan dua rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik (hubungan positif), maka rumus yang digunakan:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah (hubungan negatif), maka rumus yang digunakan:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$







Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator. Sedangkan untuk sasaran program

yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata capaian dari seluruh indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = (\% \text{capaian}_1 + \% \text{capaian}_2 + \% \text{capaian}_n) / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara realisasi dan target. Kriteria capaian indikator ditunjukkan dalam *range* seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

χ = capaian kinerja

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Evaluasi terhadap SAKIP PPPOMN menjadi masukan dan merancang inisiatif untuk merancang tata kelola yang optimal. Rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut SAKIP PPPOMN 2021

No	Rekomendasi Inspektorat Utama (isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut (isi jenis data dukung TL yang telah ada dan telah dilaksanakan)	RATL Tahun 2021 (Untuk rekomendasi yang belum dan akan ditindaklanjuti)			
		Sudah (jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	Belum (jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perencanaan							
a	Dokumen penetapan target kinerja didasarkan basis data yang memadai dan perhitungan yang logis.	penetapan target kinerja sudah berdasarkan Renstra 2020-2024		perhitungan IKK				
b	Renstra agar direviu secara berkala	telah dilaksanakan review terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja pada 2 Februari 2021 dan 30 April 2021		Dokumentasi dan notulen rapat				
c	Pemanfaatan data kinerja (perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pemanfaatan) dalam pemberian reward dan punishment.	akan dilaksanakan penyusunan IKU Pemberian Reward dan Punishment Capaian Kinerja di Lingkungan PPPOMN	belum		penyusunan draf IKU Pemberian Reward dan Punishment Capaian Kinerja di Lingkungan PPPOMN			finalisasi draf IKU Pemberian Reward dan Punishment Capaian Kinerja di Lingkungan PPPOMN
d	Melaksanakan monitoring capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya, setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, membuat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (updated performance) dan mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja beserta tindak lanjutnya.	sudah dilaksanakan rapat evaluasi capaian target perbulan sejak bulan Maret 2021 yang dipimpin langsung oleh pimpinan unit dengan peserta koodinator output dan PJ kegiatan. Setiap minggu telah dilaksanakan apel virtual dipimpin langsung oleh pimpinan unit yang menyampaikan update serapan anggaran dan target kinerja serta instruksi tindak lanjut atas capaian tersebut.		Dokumentasi dan notulen rapat, laporan evaluasi internal triwulan I tahun 2021, apel virtual				

No	Rekomendasi Inspektorat Utama (isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut (isi jenis data dukung TL yang telah ada dan telah dilaksanakan)	RATL Tahun 2021 (Untuk rekomendasi yang belum dan akan ditindaklanjuti)			
		Sudah (jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	Belum (jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)		TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Pengukuran							
a	Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja dan menunjuk pengelola yang ditunjuk sebagai penanggung jawab data kinerja	Setiap koordinator output memiliki bit.ly masing-masing untuk memantau realisasi fisik maupun realisasi anggaran dari PJ kegiatan, contoh bit.ly/anggaranMA. Setiap bulan data tersebut dijadikan bahan untuk rapat evaluasi capaian kinerja bersama pimpinan unit.		screenshoot bit.ly Data perencanaan				
b	Pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi atau sistem yang mengolah data kinerja	pengukuran kinerja menggunakan aplikasi e-performance dan SAS		screenshoot e-performance dan SAS				
c	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	sudah dilakukan hasil pengukuran kinerja dibahas pada rapat evaluasi perbulan						
3	Pelaporan							
a	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai yakni perbandingan realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas	Pada Lapkin 2020 sudah terdapat perbandingan data kinerja antara tahun 2020 dan tahun 2019 maupun perbandingan data kinerja antar unit di Pusat		Lapkin 2020 Bab 3				
b	Melaksanakan pembahasan pemanfaatan data LAKIP untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.	contoh IKSS 3 dan IKSS 11.1 tidak mencapai target tahun 2020. Sebagai tindak lanjut perbaikan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya, pada rapat evaluasi perbulan sudah dibahas rencana tindak lanjut di tahun 2021		rapat roadmap SKL 18 Maret 2021, apel virtual membahas nilai kinerja anggaran				
c	Informasi yang disajikan pada LAKIP digunakan untuk mengukur penilaian	Kelompok substansi pangan sudah menyusun						

No	Rekomendasi Inspektorat Utama (isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut (isi jenis data dukung TL yang telah ada dan telah dilaksanakan)	RATL Tahun 2021 (Untuk rekomendasi yang belum dan akan ditindaklanjuti)			
		Sudah (jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	Belum (jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)		TW I	TW II	TW III	TW IV
	kinerja sampai dengan individu	cascading sampai individu						
d	Informasi data anggaran pada dokumen SAKIP harus sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disahkan	LAPKIN 2020 Sudah sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disahkan		LAPKIN 2020 bab 2				
4	Evaluasi Internal							
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi didukung dengan dokumen hasil rapat pembahasan yang dilengkapi dengan arahan pimpinan unit atau yang berwenang, legalisasi hasil rapat dan dokumentasi	Sudah dilaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada tanggal 12 April 2021		Laporan evaluasi internal TW 1				
5	Capaian Kinerja							
	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.	Indikator kinerja yang tidak tercapai target di tahun 2020 sudah dianalisis dan diberikan rekomendasi sesuai yang tertera di Lapkin 2020		LAPKIN Tahun 2020 bab 3				

3.2 Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Laporan Kinerja TW III PPPOMN tahun 2022 disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi kegiatan dalam tahun 2022. PPPOMN telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 16 (enam belas) Indikator kinerja. Pencapaian kesebelas sasaran strategis PPPOMN tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022

Sasaran Strategis Indikator		Target Tahun 2022	Target TW III	Satuan	Realisasi	Capaian thd Target TW III	Capaian thd target tahunan
SS.1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan							
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	81	79	%	79,60	100,26	98,27
2	Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium BPOM	20	12	%	10	83,33	50
SS.2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN							
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91	-	nilai	92,64	101,80	Akhir tahun
SS.3. Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP							
1	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	80	-	%	-	Akhir tahun	Akhir tahun
SS.4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan							
1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6	79,3	%	80,16	101,09	97,05
2	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan		78,24	%	79,05	101,04	97,00
SS. 5. Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar							
1	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	75	%	77,74	103,66	77,74
SS.6. Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan							
1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	93	%	97,84	105,21	105,21
2	Indeks pelayanan publik PPPOMN	4,30	-	nilai	4,77	110,93	Akhir tahun
SS.7. Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif							
1	Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	71	64	%	64	100	100
SS.8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN							
1	Indeks RB PPPOMN	86,25	Nilai	-	-	Akhir tahun	Akhir tahun
2	Nilai AKIP PPPOMN	78,7	Nilai	-	-	Akhir tahun	Akhir tahun
SS.9. Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal							
1	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	86,25	-	Indeks	-	-	Akhir tahun
SS.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN							
1	Status akreditasi	71	-	Nilai	-	-	Akhir tahun
2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25	2,25	Nilai	2,5	111,11	111,11
SS.11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel							
1	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	94,1	85	%	79,34	93,34	84,31

Sasaran Strategis 1: Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan


Tahun 2022 sampai dengan TW III, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil melakukan pengawalan terhadap pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium serta menyusun Dokumen Grand Design Laboratorium dalam rangka memperkuat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan dengan Nilai NPS 91,99% dengan Kriteria BAIK.

IKSS 1.1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian

Dalam rangka penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan, pada tahun 2020 diterbitkan Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM berupa Keputusan Kepala Badan POM POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku untuk tahun 2020 sampai 2024 dan telah dilakukan penerapannya di Balai Besar/Balai POM dan PPPOMN pada tahun 2020 dan 2021. Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan “efisiensi dan efektivitas” laboratorium pengujian baik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) maupun BB/Balai POM dan Loka POM. Oleh karena itu, mulai tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru, yaitu “Regionalisasi Laboratorium” dengan mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam tujuh region yaitu:

1. **Region Padang** dengan anggota BB/Balai POM di Padang, Medan, Banda Aceh, Batam, Bengkulu

- 
2. **Region Pekanbaru** dengan anggota BB/Balai POM di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Pangkal Pinang
 3. **Region DKI Jakarta** dengan anggota BB/Balai POM di DKI Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Serang
 4. **Region Samarinda** dengan anggota BB/Balai POM di Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan
 5. **Region Makassar** dengan anggota BB/Balai POM di Makassar, Jayapura, Manokwari, Kendari, Mamuju
 6. **Region Manado** dengan anggota BB/Balai POM di Manado, Gorontalo, Palu, Ambon, Sofifi
 7. **Region Denpasar** dengan anggota BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang.

Dengan adanya program Regionalisasi Laboratorium ini, maka Standar Kemampuan Laboratorium mengalami perubahan menyesuaikan penugasan pengujian yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penerapan program Regionalisasi pada tahun 2022 di 34 Balai Besar/Balai POM perlu adanya pengawalan dan pendampingan yang lebih intensif sebagai awal pelaksanaan regionalisasi laboratorium BPOM dari PPPOMN maupun unit yang terkait di Badan POM yaitu Pusdatin, Biro Perencanaan maupun dari Kedeputian dan Inspektorat.

Untuk Standar Kemampuan Laboratorium PPPOMN mengalami perubahan dengan penambahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan serta Balai Kalibrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.02.10.106.03.22.49 tahun 2022 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Cara perhitungan persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah rata-rata nilai pemenuhan SKL PPPOMN dengan bobot 40% dan rata-rata nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dengan bobot 60%. Nilai pemenuhan SKL PPPOMN dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing laboratorium (Kimia Obat, Bahan Obat dan NAPPZA, Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Kimia Pangan Olahan dan Air, Baku Pembanding, Mikrobiologi dan Biologi Molekuler, Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Pengujian Khusus Obat & Makanan serta Balai Kalibrasi). Nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing Balai.

Pada tahun 2022 target indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah 81%, dengan target Nilai SKL PPPOMN adalah 83.8% dan target Nilai SKL Balai Besar/Balai POM adalah 79.1%. Pengukuran capaian untuk Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian dilakukan mulai TW I melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan, namun penetapan nilai SKL di Balai Besar/Balai POM dan PPPOMN dilakukan pada akhir tahun. Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL PPPOMN dan Balai Besar/Balai POM dilakukan setiap triwulan. Dengan dilakukan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengawal tercapainya pemenuhan SKL sesuai target akhir tahun 2022 yaitu 81%.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah 79.60% yang terdiri dari realisasi nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM sebesar 77,40%, dan realisasi nilai pemenuhan SKL PPPOMN sebesar 82,9%. Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja Triwulan 3 tahun 2022 yaitu 79%, maka capaian indikator kinerja ini adalah 100,76%.

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi IKSS} &= 79,60\% \\ \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{79,60}{79} \times 100\% = 100,76\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{79,60}{81} \times 100\% \\ &= 98,27\% \end{aligned}$$

Untuk Standar Kemampuan Laboratorium PPPOMN mengalami perubahan dengan penambahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan serta Balai Kalibrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.02.10.106.03.22.49 tahun 2022 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Tabel 8. Capaian SKL PPPOMN TW III Tahun 2022

SKL	KOBONAPPZA			OTOKSKK			KPOA			MBM			BBP			BPPB			BPKOM			Balai Kalibrasi		
	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III
Ruang Lingkup	71,6	75,6	80,2	81,4	82,37	84,86	72,0	72	73,2	69,64	75,2	77,5	69,9	70,94	73,84	61,84	61,84	62,10	66,78	71,89	77,90	55,17	55,17	82,76
Kompetensi	86,0	89,8	90,0	83,3	83,33	84,08	87,0	87,7	87,9	89,52	90,7	91,2	82,8	90,49	91,60	91,05	92,00	92,00	91,84	91,84	92,78	80,85	82,70	82,70
Peralatan	82,1	82,3	82,0	82,6	82,6	82,6	69,0	73,6	73,9	72,57	89,3	87,8	76,8	88,07	81,78	82,96	83,89	83,96				77,17	82,61	83,70
Rata-Rata	79,9	82,6	84,1	82,4	82,8	83,8	76,0	77,8	78,3	77,24	85,1	85,5	76,5	83,2	82,41	72,40	79,24	79,35	79,31	81,87	85,34	71,06	73,49	83,05
Target 2022	83,8																							
Capaian TW III	82,7																							

Dari hasil monitoring dan evaluasi SKL pada Triwulan 3 di PPPOMN rata-rata terdapat peningkatan. Untuk poksi yang mengalami penurunan Mikrobiologi dan Biologi molekuler pada pemenuhan peralatan yang disebabkan kerusakan pada Water Purification. Dan table di atas untuk ruang lingkup masih perlu enterfrensi peningkatan adalah RL poksi BPPB dengan capaian 62,10%.

Untuk lebih mengawal pencapaian sesuai target SKL perlu dilakukan intervensi peningkatan pemenuhan SKL di PPPOMN dengan melalui perbaikan peralatan untuk alat yang rusak dan pemenuhan pembuatan metode analisis sesuai perencanaan, sedangkan untuk di Balai POM perlu dilakukan intervensi pemenuhan ruang lingkup dan kompetensi dengan PPPOMN memberikan bimbingan pengujian teknis di Balai POM.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Dalam rangka mengawal pemenuhan Indikator Kinerja Utama PPPOMN yaitu Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian, maka perlu dibuat strategi pemenuhannya. PPPOMN sebagai Pembina laboratorium Badan POM yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kemampuan laboratorium Badan POM mewujudkan strategi tersebut dengan kegiatan antara lain penyusunan strategi perencanaan berupa penyusunan Road Map pemenuhan SKL di 34 Balai POM dan PPPOMN melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap pemenuhannya.

Di tahun 2022 dalam rangka pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM sesuai regionalisasi laboratorium, PPPOMN melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan sehingga dapat memberikan intervensi dan solusi terhadap kendala pemenuhannya. Beberapa intervensi yang dilakukan oleh PPPOMN antara lain peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis secara hybrid (daring dan luring) serta mengikutsertakan dalam uji kolaborasi dan uji profesiensi untuk meningkatkan ruang lingkup pengujian.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM terutama untuk 4 Balai POM di Manokwari, Sofifi, Mamuju dan Tarakan yang nilai SKL-nya masih dibawah 70%.

- Kegiatan ini sudah terealisasi di 3 Balai POM yaitu Manokwari, Sofifi dan Mamuju sedangkan Balai POM di Tarakan akan dilaksanakan pada Oktober 2022
- PPPOMN melakukan program pendampingan kepada Balai POM berupa bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pengujian dan ruang lingkup pengujian. Program Pendampingan pemenuhan SKL telah dilakukan pada Juli s/d September 2022 berupa materi pelatihan dasar kimia dan mikrobiologi serta pemahaman sistem manajemen mutu untuk Balai POM di Tarakan dan Mamuju. Untuk Balai POM di Mamuju yang tahun 2022 proses akreditasi ISO/IEC 17025 akan dilaksanakan pada 12-13 Oktober 2022 oleh KAN/BSN.
- Memberikan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan peningkatan SKL.
- Penyusunan perencanaan peningkatan SKL, monitoring pelaksanaan, evaluasi dan memberikan solusi pemenuhan sesuai target yang telah ditetapkan
- Untuk Balai-balai yang sudah memenuhi 70% dilakukan bimbingan teknis untuk peningkatan ruang lingkup, terutama untuk pengujian spesifik

Tabel 9. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 1.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan ruang lingkup melalui kegiatan pembahasan metode analisis masing-masing poksi dan Balai UPT PPPOMN dengan tenaga ahli		Pembahasan 10 judul MA BPPB, 11 judul MBM dan 18 judul Kobonappza	Akhir Oktober s/d minggu I Desember
2	Melaksanakan Bimtek dalam rangka peningkatan ruang lingkup di Balai POM		Pekanbaru, Denpasar Manokwari	Oktober s/d Nopember

IKSS 1.2 Persentase pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM

Penyusunan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM merupakan strategi dalam rangka memperkuat laboratorium. *Grand Design* (GD) memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM.

Pada tahun 2021 telah terpenuhi target 5% berupa tersusunnya dokumen *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan *Grand Design* laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. Target pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM tahun 2022 adalah sebesar 15% yang meliputi kegiatan:

- Penyusunan tim dan pedoman Green Laboratory serta kajian Green Laboratory (2%)
- Penyusunan tim dan pedoman Digital Laboratory (3%)
- Monitoring dan evaluasi implementasi regionalisasi laboratorium serta pendampingan (4%)
- Pembinaan BB/Balai POM dalam Percepatan Pemenuhan SKL (4%)
- Pengembangan Laboratorium Balai Baru (1%)
- Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian Obat dan Makanan(1%)

Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022, target pada triwulan (TW) II untuk indikator ini adalah 8%. Adapun pencapaian target indikator pada TW III tahun 2022 ini sebesar 10 % yaitu

- Dokumen *Grand Design* penguatan laboratorium pengawasan obat dan makanan (5%) pada tahun 2021
- Dokumen Penyusunan tim dan pedoman Digital Laboratory (1%)
- Monitoring dan evaluasi implementasi regionalisasi laboratorium serta pendampingan (3 %) berupa 3 kegiatan
- Pengembangan Laboratorium Balai Baru (1%)

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Capaian indikator ini bersifat kumulatif dari capaian tahun sebelumnya, dan persentase dihitung terhadap target tahun 2024 (akhir RPJMN), sehingga target indikator sampai dengan tahun 2022 adalah 20%. Pemenuhan target *grand design* pada TW III adalah 7%. Perhitungan realisasi target indikator persentase *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM pada TW III tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Persentase Grand Design terealisasi pada TW III tahun 2022}}{\text{Persentase Target Grand Design sampai dengan tahun 2022}} \times 100\% \\ &= \frac{10}{20} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{10\%}{12\%} \times 100\% \\ &= 83,3\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{10}{20} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Keberhasilan

Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin sehingga kegiatan terlaksana sesuai perencanaan. Namun untuk pilot project LIMS pada implementasi digitalisasi laboratorium tidak dapat dilanjutkan, karena pengadaan yang dilakukan pada TW III ini dibatalkan dengan adanya pengurangan anggaran PPMOMN tahun 2022

Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin sehingga kegiatan terlaksana sesuai perencanaan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai perencanaan, kecuali penghentian pilot project LIMS yang ditunda dan akan dilakukan tahun 2023.

Tabel 10. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 1.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum
			Rencana Aksi
1	Pilot project LIMS yang ditunda		Mengusulkan kegiatan pilot project LIMS TA 2023 2023.

Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPMOMN

IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di PPMOMN

Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam hal pelayanan publik, PPPOMN telah berkontribusi menunjang kebutuhan baku pembanding kimia, baku mikroba dan hewan uji dalam pengawasan mutu internal di industri obat dan makanan maupun pada riset dan pengembangan oleh akademisi dan mahasiswa. Layanan uji profisiensi, kalibrasi alat dan pelatihan terkait teknis laboratorium juga menunjang kegiatan stakeholder eksternal dari lintas K/L maupun dari laboratorium pengujian lain di luar BPOM. Demikian halnya dengan layanan pengujian yang dilakukan oleh PPPOMN. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, PPPOMN dengan inovasi layanannya yaitu pengujian Polymerase Chain Reaction (PCR) spesimen COVID-19 telah mendapatkan penghargaan sebagai 2 besar Top 3 Inovasi selama Pandemi dari Kemenpan RB, dan pada tahun 2022 meningkatkan kontribusinya kepada pemerintah melalui pengujian Whole Genome Sequencing (WGS) virus SARS-COV-2 dalam rangka surveillance Virus.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan selama 3 bulan (Februari - Mei 2022) diperoleh jumlah populasi penerima layanan sebanyak 195 pelanggan dari tujuh jenis layanan publik PPPOMN. Pada pengukuran nilai SKM jumlah data yang digunakan dapat dilihat pada tabel 6, Nilai SKM tiap jenis layanan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 11. Jumlah Responden SKM Berdasarkan Jenis Layanan

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH POPULASI PENERIMA LAYANAN	JUMLAH SAMPEL
1	Pembelian Baku Pembanding Farmakope Indonesia	106	83
2	Pembelian Kultur Bakteri	13	13
3	Pembelian Hewan Uji	22	21
4	Jasa Pengujian	20	20
5	Jasa Uji Profisiensi	13	13
6	Jasa Kalibrasi	2	2
7	Jasa Pelatihan	19	19
Jumlah		195	171

Tabel 12. Nilai SKM Tiap Jenis Layanan

NO	JENIS LAYANAN	NILAI SKM
1	Pembelian Baku Pembanding Farmakope Indonesia	91,94
2	Pembelian Kultur Bakteri	95,30
3	Pembelian Hewan Uji	89,59
4	Jasa Pengujian	95,00
5	Jasa Uji Profisiensi	84,14
6	Jasa Kalibrasi	100,00
7	Jasa Pelatihan	99,81
Jumlah		92,64

Kategori Nilai SKM:

Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)	:	88,31 – 100,00
Mutu Pelayanan B (Baik)	:	76,61 – 88,30
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik)	:	65,00 – 76,60
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)	:	25,00 – 64,99

Nilai SKM tiap jenis layanan yang diperoleh dari jumlah sampel 171 orang berkisar antara 84,14 – 100,00. Nilai SKM terendah pada Layanan Jasa Uji Profisiensi dan tertinggi pada Layanan Jasa Kalibrasi. Rata-rata nilai SKM dari tujuh jenis layanan adalah **92,64** masuk dalam kategori Mutu Pelayanan A (**Sangat Baik**), dimana nilai yang dicapai ini melebihi target nilai SKM tahun 2022 yaitu 91.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, PPPOMN senantiasa melakukan survei kepuasan masyarakat pengguna layanan. Dari hasil survei pada tahun 2022 ini diperoleh rata-rata nilai SKM dari 7 layanan PPPOMN sebesar 92,64, dimana nilai ini masuk kedalam kategori mutu pelayanan yang sangat baik, hal ini dapat dicapai karena PPPOMN berkomitmen untuk terus berbenah diri dan meningkatkan mutu layanan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan, PPPOMN akan terus memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan, menjaga dan meningkatkan kompetensi petugas layanan, meriviu prosedur layanan, serta menjaga kualitas produk/jasa layanan.

Tabel 13. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 2.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	meningkatkan kualitas layanan terutama layanan yang masih memperoleh nilai dibawah 90, yaitu jasa uji profisiensi dan pelayanan hewan uji di PPPOMN.	-	Penyelenggaraan uji profisiensi yang akan di akreditasi ISO 17043:2010	2023
2	Pemberitahuan waktu pengambilan hewan uji dan kelengkapan administrasinya	-	Modifikasi pada fitur infalab (konsep sudah diksusi dengan PUSDATIN)	Desember 2022

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP

IKSS 3.1 Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/ BPOM sesuai standar GLP

GLP (*Good Laboratory Practice*) yang dimaksud adalah Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tahun 2020-2024 yang meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi, dan Standar peralatan. Laboratorium Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) yang memenuhi standar kemampuan laboratorium adalah laboratorium BB/BPOM yang mencapai nilai sama dengan atau lebih dari *cut off* ($\geq 70\%$). Pemenuhan SKL diperoleh dari hasil asesmen laboratorium BB/BPOM menggunakan SKL Balai POM Tahun 2020-2024.

Pengukuran Capaian Indikator nilai persentase pemenuhan SKL BB/BPOM dilakukan pada akhir tahun. Cara perhitungan capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Hitung persentase pemenuhan standar kemampuan laboratorium (rata-rata dari SRL, alat dan kompetensi) untuk masing-masing BB/BPOM
2. Hitung jumlah BB/BPOM yang memenuhi standar kemampuan laboratorium dengan nilai rata-rata $\geq 70\%$ (*cut off*) menggunakan standar kemampuan laboratorium (2020- 2024)
3. Jumlah BB/BPOM yang memiliki nilai pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium $\geq 70\%$ dibagi jumlah keseluruhan BB/BPOM (34 BB/BPOM).

Dari monitoring dan evaluasi SKL pada Triwulan III tahun 2022, didapatkan pemenuhan/capaian SKL di atas 70% untuk 30 Balai POM dari 34 BB/BPOM.

Tabel 14. Hasil Monev Standar Kemampuan Balai Besar/Balai POM Triwulan 3 Tahun 2022

No.	Balai Besar/Balai POM	Hasil Monev Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2022											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total
1	Aceh	76,19	82,32	74,37	77,63	77,17	83,11	74,37	78,22	80,74	83,86	75,84	80,15
2	Ambon	74,91	84,46	62,53	73,97	75,75	85,63	62,53	74,64	76,99	86,31	65,98	76,43
3	Bandar Lampung	79,01	86,28	67,73	77,67	80,94	87,25	67,47	78,55	81,80	88,02	68,92	79,58
4	Bandung	82,04	82,34	75,01	79,79	82,84	82,62	74,32	79,93	84,17	84,88	74,67	81,24
5	Banjarmasin	75,61	84,44	68,58	76,21	76,15	85,12	71,94	77,74	77,85	85,40	73,94	79,06
6	Batam	75,84	83,71	69,51	76,35	76,69	83,71	69,69	76,69	77,78	87,26	71,69	78,91
7	Bengkulu	74,84	82,59	86,93	81,45	75,91	82,59	86,93	81,81	77,40	82,59	86,28	82,09
8	Denpasar	78,10	89,03	75,51	80,88	80,29	89,39	76,67	82,12	81,32	89,83	77,48	82,88
9	DKI Jakarta	80,73	92,41	74,90	82,68	82,36	93,09	76,19	83,88	83,09	93,33	77,45	84,62
10	Gorontalo	74,96	79,23	69,98	74,72	77,65	84,59	69,98	77,40	80,18	86,01	69,98	78,72
11	Jambi	74,39	84,55	64,20	74,38	74,91	87,24	66,26	76,14	75,92	86,23	66,50	76,22
12	Jayapura	73,77	81,39	73,28	76,14	73,91	82,27	73,86	76,68	76,74	86,99	75,47	79,73
13	Kendari	74,35	90,35	66,21	76,97	75,40	90,35	67,53	77,76	80,54	90,37	68,52	79,81
14	Kupang	78,86	91,44	74,47	81,59	78,86	91,70	75,63	82,07	79,14	92,24	81,02	84,14
15	Makassar	75,89	80,26	71,56	75,90	76,85	81,37	72,36	76,86	79,19	77,73	75,40	77,44
16	Mamuju	44,30	63,66	32,37	46,77	44,57	63,91	32,55	47,01	45,41	68,61	39,62	51,21
17	Manado	76,40	88,74	73,31	79,48	77,54	88,99	73,31	79,95	79,18	89,51	73,03	80,57
18	Manokwari	65,91	72,00	57,98	65,30	73,38	84,68	57,98	72,01	81,12	89,00	66,84	78,99
19	Mataram	86,24	89,53	75,60	83,79	86,57	89,02	82,37	85,99	87,33	92,36	81,14	86,94
20	Medan	79,31	87,76	67,98	78,35	79,47	89,41	68,50	79,12	81,06	90,27	69,56	80,30
21	Padang	77,93	86,56	72,15	78,88	78,53	89,32	72,18	80,01	78,88	90,14	72,54	80,52
22	Palangkaraya	70,68	89,48	79,37	79,84	73,71	90,05	79,37	81,05	75,42	90,38	81,37	82,39
23	Palembang	79,91	86,76	66,85	77,84	80,70	87,16	70,66	79,51	82,22	87,78	71,91	80,64
24	Palu	78,26	86,16	73,82	79,41	79,28	86,73	74,19	80,07	79,84	87,52	74,63	80,66
25	Pangkalpinang	80,09	84,85	70,98	78,64	81,18	85,38	71,87	79,47	82,20	85,88	72,06	80,05
26	Pekanbaru	73,17	87,17	82,77	81,04	74,62	87,81	83,38	81,94	77,98	87,93	83,38	83,10
27	Pontianak	77,77	80,36	75,19	77,77	78,44	86,63	77,40	80,82	81,51	88,92	81,21	83,88
28	Samarinda	79,60	84,62	70,56	78,26	80,26	85,93	69,79	78,66	81,21	88,95	71,37	80,51
29	Semarang	78,59	87,81	79,54	81,98	78,90	86,32	80,33	81,85	80,94	87,77	82,59	83,77
30	Serang	81,33	88,64	78,51	82,83	82,00	91,25	78,51	83,92	86,68	92,79	79,34	86,27
31	Sofifi	28,20	35,52	14,91	26,21	29,50	38,59	20,75	29,61	33,64	43,36	21,56	32,85
32	Surabaya	81,36	85,58	77,49	81,48	83,00	86,31	78,60	82,64	85,84	87,03	80,63	84,50
33	Yogyakarta	79,08	88,87	76,89	81,61	80,40	88,93	74,44	81,26	80,82	89,41	76,74	82,32
34	Tarakan	2,55	51,59	19,90	24,68	2,55	51,44	19,36	24,45	14,60	56,34	21,42	30,79
	Rata-rata	72,65	82,37	68,26	74,43	73,83	83,76	69,16	75,58	76,14	85,15	70,88	77,39

Dari monitoring dan evaluasi SKL pada Triwulan 3 tahun 2022, didapatkan capaian rata-rata pemenuhan SKL adalah 77,39%, meningkat dari capaian pada TW III yaitu 75,58%. Untuk pemenuhan jumlah Balai POM yang capaian SKL di atas 70% adalah 31 BB/Balai POM dari 34 BB/Balai POM dengan penambahan Balai POM Manokwari. Untuk Balai POM yang masih belum memenuhi sesuai cut off 70% adalah Balai POM di Sofifi, Mamuju dan Tarakan.

a. Progres Indikator Kinerja pada TW III Tahun 2022

Hasil penilaian standar kemampuan laboratorium BPOM berdasarkan tabel 10 terdapat 31 BB/Balai POM yang memperoleh nilai melebihi 70% (*cutt-off*70%). Capaian ini melebihi dari target tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 26 BB/Balai POM yang memperoleh nilai SKL > 70%.

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{31}{34} \times 100\% = 91,18\%$$

$$\% \text{ Capaian IKSS} = \frac{81,18}{80} \times 100\% = 113,97\%$$

b. Progres Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{91,18}{80} \times 100\% \\ &= 113,97\% \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Adanya Monitoring dan evaluasi setiap triwulan merupakan sarana yang efektif untuk memantau capaian SKL BB/balai POM.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai POM adalah:

- Terjadi perubahan kebijakan untuk pengujian antara lain dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adanya Percepatan pengujian sampel ikan kaleng yaitu pengujian parameter Kandungan BPA pada Ikan kaleng dan Migrasi BPA dari kemasan kaleng. Sesuai dengan PoA seharusnya dijadwalkan September tetapi dipercepat menjadi bulan Agustus. Sehingga ada 11 sampel ikan dalam kaleng tidak memenuhi timeline pengujian dikarenakan yang parameter lainnya (PK Chloramphenicol dan Histamin) yang belum selesai dilakukannya pengujian nya sampai dengan saat ini.
- Dari Kedeputian Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan untuk pengujian sampel regional pelangsing turunan sibutramin di uji jika pengujian dasar positif maka sampel baru di uji ke balai spesifik, namun pengujian orlistat tetap di uji di Balai Spesifik karena belum ada metode TLC, Balai Besar POM di pekanbaru untuk TW III tetap menguji turunan sibutramin walaupun hasil pengujian dasar negatif.
- Sampel sukar didapatkan untuk Kelas terapi Saluran Pernapasan dan Anti Parasit di Balai

POM di Batam

- Sampling dan Pengujian Kelas terapi antineoplastik masih menunggu arahan Ditwas KMEI dan P3OMN Masih belum bisa sepenuhnya mengikuti acuan dalam Prioritas Sampling Alat lab dan suku cadang belum tersedia (termasuk Balai/Loka dalam region) Reagen tidak tersedia dan sulit dipasaran
- Jumlah sampel tiap generik name yang akan masuk ke lab tidak bisa diprediksi, sehingga menyebabkan kebutuhan reagen yang direncanakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan sampel yang akan diuji.
- Pelaporan hasil uji terkendala entry SIPT yang sampai saat ini pada umumnya Balai/Loka masih banyak yang belum entry dan konsisten dalam pengisian bit.ly data bersama, komitmen bersama sangat diperlukan

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Untuk Balai POM yang masih mempunyai capaian SKL di bawah 70% perlu dilakukan pendampingan dan intervensi secara intensif dan memberikan intervensi dan solusi terhadap kendala yang dihadapi Balai POM. PPPOMN agar melakukan pendampingan untuk 3 Balai POM (Sofifi, Mamuju dan Tarakan) agar pemenuhan SKL tahun 2022 sesuai target yang telah ditetapkan. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM terutama untuk 3 Balai POM di Sofifi, Tarakan dan Mamuju yang nilai SKL-nya masih dibawah 70%.

- PPPOMN melakukan program pendampingan yang lebih intensif kepada Balai POM berupa bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pengujian dan ruang lingkup pengujian.
- Memberikan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan peningkatan SKL.

Tabel 15. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKKSS 3.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pendampingan di 4 Balai POM yaitu Manokwari, Sofifi Mamuju dan Tarakan	Manokwari Sofifi dan Mamuju.	Pendampingan pemenuhan SKL di Balai POM di Tarakan berupa pelatihan dasar pengujian dan penambahan ruang lingkup pengujian	Akhir bulan Oktober
2	Balai Besar/Balai POM yang sudah memenuhi capaian SKL di atas cut off > 70%		bimbingan teknis untuk peningkatan ruang lingkup, terutama untuk pengujian spesifik	TW 4 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis 4: **Meningkatnya Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan**

Tahun 2022 sampai dengan TW III Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil mengembangkan Metode Analisis dan Baku Pembanding sesuai dengan kebutuhan dengan nilai NPS 101,06 % dengan Kriteria BAIK.

IKSS 4.1 Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan

Indikator sasaran strategis ini adalah persentase Metode Analisis (MA) yang dikembangkan terhadap kebutuhan. MA yang dikembangkan oleh PPPOMN (validasi/verifikasi) digunakan untuk pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler, produk biologi, serta pengelolaan hewan percobaan.

Indikator persentase MA yang dikembangkan, diukur dengan penambahan MA yang dikembangkan pada tahun berjalan yang diakumulasikan dengan jumlah tahun sebelumnya, kemudian dihitung peningkatannya terhadap total target MA yang akan dicapai pada tahun 2024 sejumlah 2.213 judul MA (100%), sesuai dengan penyesuaian target akibat terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Target persentase capaian akumulasi jumlah MA di tahun 2022 adalah 82,60% dan 79,30% sampai dengan September 2022 (TW3 2022), dari target 100% pada tahun 2024. Berdasarkan kesepakatan antara 4 (empat) Kelompok Substansi (Poksi) dan 1 (satu) UPT di bawah PPPOMN dengan Kepala PPPOMN pada tanggal 4 Januari 2022, maka ditetapkan target jumlah Metode Analisis (MA) yang dikembangkan PPPOMN tahun 2022 adalah 200 MA. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (60 MA); Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (43 MA); Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Pangan Olahan dan Air sebanyak (39 MA); Poksi Pengembangan Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (43 MA); dan Balai Pengujian Produk Biologi (15 MA).

Sampai dengan bulan September 2022 (TW3), terdapat penambahan 123 judul MA atau total akumulasi MA menjadi 1774. Sesuai dengan penambahan tersebut, maka realisasi capaian

TW3 sebesar 80,16% dari total target (100%) pada 2024. Persentase tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Realisasi capaian TW III 2022	=	$\frac{\text{Jumlah MA (sebelumnya + Tahun 2021 + TW III 2022)}}{\text{Total MA 2024}}$	x 100 %
	=	$\frac{1473 + 178 + 123}{2213}$	x 100 %
	=	80,16 %	

Berdasarkan realisasi capaian di atas, maka persen capaian TW3 terhadap target sampai dengan September 2022 adalah 101,09% dan terhadap target tahunan (2022) adalah 97,05%. Persen capaian tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

% capaian terhadap target TW III 2022	=	$\frac{\text{Realisasi capaian TW III 2022}}{\text{Target capaian TW III 2022}}$	x 100 %
	=	$\frac{80,16 \%}{79,30 \%}$	x 100 %
	=	101,09 %	

% capaian terhadap target Tahun 2022	=	$\frac{\text{Realisasi capaian TW III 2022}}{\text{Target capaian Tahun 2022}}$	x 100 %
	=	$\frac{80,16 \%}{82,60 \%}$	x 100 %
	=	97,05 %	

Persen capaian terhadap target TW III 2022 (101,09 %) menunjukkan pelampauan dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena proses pengembangan MA berjalan dengan baik. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah terpenuhinya semua kebutuhan dalam pengembangan MA, seperti personel yang kompeten, sampel, media, pereaksi, dan peralatan. Selain itu, pembahasan MA dengan tenaga ahli juga telah dilaksanakan sehingga telah banyak MA yang disetujui. Untuk selanjutnya, persen capaian terhadap target TW IV 2022 diharapkan sama baiknya dengan persen capaian terhadap target TW3 2022. Dengan tercapainya target TW4 2022, maka diharapkan target persentase capaian akumulasi jumlah MA di tahun 2022 juga akan tercapai.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Realisasi capaian TW III 2022	=	$\frac{\text{Jumlah MA (sebelumnya + Tahun 2021 + TW3 2022)}}{\text{Total MA 2024}}$	x 100 %
	=	$\frac{1651 + 74}{2213}$	x 100 %
	=	77,95 %	

Berdasarkan realisasi capaian di atas, maka persen capaian TW III terhadap target sampai dengan Juni 2022 adalah 100,19% dan terhadap target tahunan (2022) adalah 94,37%. Persen capaian tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

% capaian terhadap target TW III 2022	=	$\frac{\text{Realisasi capaian TW III 2022}}{\text{Target capaian TW III 2022}}$	x 100 %
	=	$\frac{77,95 \%}{77,80 \%}$	x 100 %
	=	100,19 %	

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

% capaian terhadap target Tahun 2022	=	$\frac{\text{Realisasi capaian TW III 2022}}{\text{Target capaian Tahun 2022}}$	x 100 %
	=	$\frac{77,95 \%}{82,60 \%}$	x 100 %
	=	94,37 %	

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerjaserta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Persen capaian terhadap target TW III 2022 (100,19%) terhitung sudah cukup tinggi. Faktoryang menyebabkan keberhasilan tersebut adalah kondisi TW III yang lebih mendukung daripada TW sebelumnya. Kondisi pandemi COVID-19 yang mulai membaik pada TW III meningkatkan persentase kehadiran WFO sehingga jumlah MA yang dikerjakan meningkat. Pengadaan bahan dan pereaksi yang dibutuhkan dalam pembuatan MA sudah terealisasi. Selain itu, pembahasan MA dengan tenaga ahli juga mulai dilakukan sehingga jumlah MA yang diterima atau disetujui meningkat. Pada triwulan selanjutnya, diharapkan kondisi tersebut dapat dipertahankan sehingga persen capaian terhadap target TW III 2022 dapat dipenuhi dengan baik.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Melaksanakan kegiatan pengembangan MA sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat masing-masing kelompok substansi dan balai.

Tabel 16. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 4.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan kegiatan pengembangan MA sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat masing-masing kelompok substansi dan balai serta mealakukan pembahasan dengan tenaga ahli		Pembahasan dengan tenaga ahli	
2			BPPB 10 judul	Nopember minggu ke 2 - untuk 4 judul Nopember akhir untuk 2 judul Desember minggu ke 1 untuk 3 judul
3			MBM 11 judul	Nopember minggu terakhir 2 kali dengan rincian 1 kali untuk 4 judul yang ke - 2 dengan 3 judul dan Desember minggu pertama 4 judul
4			KOBONAPPZA 18 judul	Oktober akhir untuk 6 judul , Nopember minggu ke 2 untuk 6 judul dan Desember minggu kedua 6 judul
5			OT SKK 29 judul	Desember minggu ke- 2 sebanyak 29
			KPOA 10 judul	Desember minggu ke 2

IKSS 4.2 Persentase Baku Pemanding yang ditetapkan sesuai Kebutuhan

Persentase Baku Pemanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan merupakan Baku Pemanding kimia dan mikroba yang diperlukan untuk pengujian Obat dan Makanan, dikembangkan/diproduksi kembali dan dilakukan uji ulang/stabilitas oleh PPPOMN serta khusus untuk Baku Pemanding Kimia juga oleh Balai Besar POM di Yogyakarta.

Indikator persentase baku pemanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan dihitung berdasarkan akumulasi dari penambahan baku pemanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan pada tahun berjalan terhadap jumlah baku pemanding tahun sebelumnya, kemudian dihitung persentase peningkatannya terhadap total target baku pemanding yang akan dicapai pada tahun 2024.

Baku pemanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan pada TW 3 tahun 2022 sebanyak 57 Baku Pemanding kimia dan 20 baku pemanding mikroba.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Pencapaian realisasi Baku Pembanding (kimia dan mikroba) yang dikembangkan terhadap kebutuhan pada TW III tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{a + b + c}{d} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{885 + 57 + 20}{1227} \times 100\%$$
$$\% \text{ Realisasi} = 78,40\%$$

Keterangan:

a = Total baku pembanding kimia dan mikroba yang dikembangkan sampai dengan Tahun 2021

b = Total baku pembanding kimia yang dikembangkan pada TW III Tahun 2022

c = Total baku pembanding mikroba yang dikembangkan pada TW III Tahun 2022

d = Total baku pembanding kimia dan mikroba yang dikembangkan sampai dengan Tahun 2024

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Persentase capaian IKSS pada TW III tahun 2022 dihitung terhadap realisasi pemenuhan baku pembanding, diperoleh dengan perhitungan:

$$\% \text{ Capaian IKSS} = \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ target TW III}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian IKSS} = \frac{78,40}{78,24} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian IKSS} = 100,21\%$$

c. Analisis Keberhasilan dan Tindak Lanjut

Target Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan TW III tahun 2022 adalah 78,24%. Realisasi pemenuhan baku pembanding TW III tahun 2022 sebesar 78,40% yang berarti target tercapai. Hal ini karena ketersediaan bahan baku dan baku primer, pengadaan bahan baku dan baku primer/reagensia/suku cadang, dan proses pengujian untuk pengembangan baku pembanding masih berjalan sesuai dengan perencanaan

Untuk memenuhi capaian realisasi Baku Pembanding (kimia dan mikroba) yang dikembangkan terhadap kebutuhan pada TW IV Tahun 2022 maka akan dikembangkan sebanyak 33 Baku pembanding (sebanyak 28 Baku Pembanding kimia dan 5 baku pembanding mikroba) sehingga total akumulasi 90 baku pembanding pada TW IV dengan presentase pemenuhan 81,50%.

Tahun 2022 sampai dengan TW III, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil meningkatkan alat laboratorium Badan POM yang dikalibrasi sesuai standar dengan nilai NPS 103,66% dengan Kriteria BAIK.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Tabel 17. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 4.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Akan dikembangkan sebanyak 33 baku pembanding 28 baku pembanding kimia dan 5 baku mikroba	-	Pembahasan dengan tenaga ahli	Minggu pertama Desember

Sasaran Strategis 5:
Terpenuhinya Alat Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Tahun 2022 sampai dengan TW III, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil melakukan tepenuhinya alat laboratorium pengujian obat dan maknanan yang dikalibrasi sesuai standardengan Nilai NPS 103,66% dengan Kriteria BAIK

IKSS 5.1 Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar

Target alat ukur laboratorium BPOM yang dikalibrasi pada tahun 2024 adalah 3.528 alat dan target sebesar 100% (3.154 alat) untuk tahun 2022. Pada triwulan III, Balai Kalibrasi telah melakukan kalibrasi alat sebanyak 2452 alat dengan capaian sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Sampai dengan TW III, Balai Kalibrasi telah melakukan kalibrasi alat sebanyak 2452 alat dengan capaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah alat yang dikalibrasi}}{\text{Target yang direncanakan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2452}{3154} \times 100\% = \mathbf{77,74 \%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan RAPK, target persentase alat yang dikalibrasi pada TW III sebesar 77,74 % dari target akhir tahun 2024. Maka dapat dihitung % Capaian Indikator ini sebagai berikut:

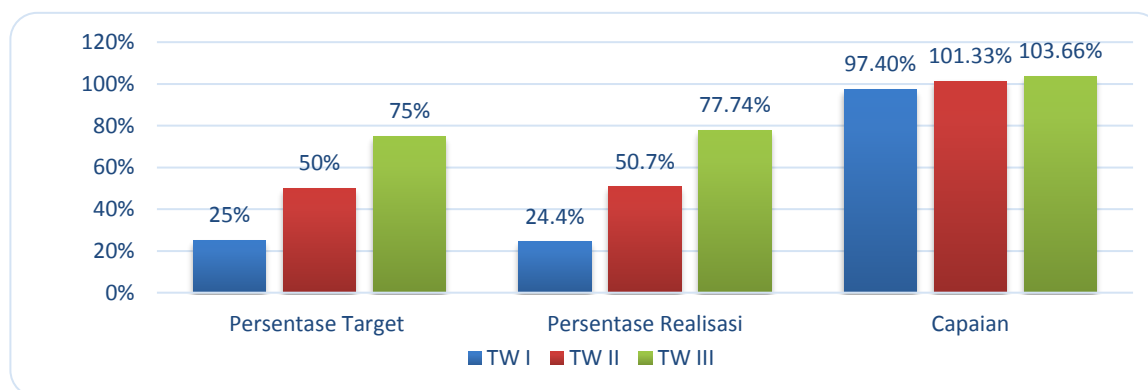
$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{77,74}{75} \times 100\% = 103,66\% \end{aligned}$$

Sampai TW III, telah dilakukan kalibrasi dengan rincian seperti pada Tabel 15.

Tabel 18. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai/Balai Besar/Loka POM/Laboratorium Triwulan III Tahun 2022

Waktu Kalibrasi	Nama Balai/ Lab.	Jumlah Alat
1. Januari	DKI JAKARTA	83
	JAMBI	53
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	6
	PPPOMN - BALAI PENGUJIAN KHUSUS	33
	PPPOMN - BBP	11
	PPPOMN - KOBONAPPZA	31
	PPPOMN - MBM	35
	PPPOMN - OTSKKOS	23
	PPPOMN - PANGAN & AIR	10
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	44
2. Februari	JAYAPURA	7
	PALANGKARAYA	62
	PALU	76
	PEKANBARU	76
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	16
	SAMARINDA	46
3. Maret	TARAKAN	16
	BANDA ACEH	59
	JAYAPURA	9
	MATARAM	66
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	6
4. April	BANDAR LAMPUNG	53
	BANJARMASIN	61
	DENPASAR	73
	JAYAPURA	60
	MAKASSAR	80
	PPPOMN - PANGAN & AIR	4
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	12
5. Mei	SERANG	73
	AMBON	66
	BANDA ACEH	26
	PPPOMN - BPKOM	23
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	24
6. Juni	TARAKAN	11
	BATAM	68
	DENPASAR	1
	KENDARI	61
	LOKA POM BANGGAI	1
	LOKA POM MANGGARAI BARAT	1
	MAMUJU	16
	PPPOMN - BBP	3
	PPPOMN - KOBONAPPZA	6
	SERANG	1
	TARAKAN	19
	YOGYAKARTA	87
	BATAM	68
7. Juli	BANDA ACEH	3
	BANDUNG	71
	BPOM PALU	6

Waktu Kalibrasi	Nama Balai/ Lab.	Jumlah Alat
	BPOM SOFIFI	22
	DENPASAR	1
	DKI JAKARTA	25
	LOKA POM ACEH SELATAN	2
	LOKA POM ENDE	13
	LOKA POM TANIMBAR	5
	PALU	3
	PANGKALPINANG	22
	PONTIANAK	45
	PPOMN - BALAI KALIBRASI	1
	PPOMN - BBP	2
	PPOMN - KOBONAPPZA	18
	PPOMN - OTSKKOS	25
	PPOMN - PRODUK BIOLOGI	12
	SURABAYA	75
8. Agustus	BBPOM DKI JAKARTA	1
	BENGKULU	66
	DENPASAR	20
	DKI JAKARTA	7
	ENDE	29
	GORONTALO	57
	MAMUJU	49
	MATARAM	4
	MIKROBIOLOGI	7
	MIMIKA	1
	PALEMBANG	64
	PPOMN - BALAI KALIBRASI	4
	PPOMN - BBP	27
	PPOMN - KOBONAPPZA	15
9. September	BBPOM DKI JAKARTA	2
	MANOKWARI	47
	MATARAM	12
	PADANG	63
	PALU	10
	PPOMN - BALAI KALIBRASI	1
	SOFIFI	17
Grand Total		2583



Gambar 8. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\%IKSS = \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\%$$

$$= \frac{77,74}{100} \times 100\%$$

$$= 77,74 \%$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Target kalibrasi peralatan pada TW III yaitu 75%, target capaian pada periode tersebut telah tercapai dengan 77,74%. Terdapat gap 2,74% antara realisasi dengan capaian triwulan III. Hal ini disebabkan adanya alat laboratorium (alat penunjang) dari Balai/Balai Besar POM dan Loka mengirimkan alat untuk dilakukan direkalibrasi di Balai Kalibrasi (Ex Situ)

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Pelaksanaan kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium obat dan makan dilaksanakan sesuai dengan POA yang telah disusun


Tabel 19. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 5.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penambahan Ruang Lingkup Layanan Kalibrasi Peralatan Laboratorium	Parameter Kalibrasi: Gaya Massa <ul style="list-style-type: none"> Anak Timbangan 500 g - 2000 g Timbangan 1000 g - 20.000 g Mikropipet / piston pipet 0,1 µL - 10 mL Volumetric Glassware 2000 mL Suhu <ul style="list-style-type: none"> Termometer Digital -80 °C s.d. + 260 °C Temperatur refrigerator -80°C s.d. +10 °C Alat Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> Filter Holmium Oksida Thermohyrometer 		
3			Laju Putar Frekuensi <ul style="list-style-type: none"> Kalibrasi Tachometer menggunakan Stroboscope Alat Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> Conductivity Meter. Glass Filter Ketepatan Fotometri (daerah ultraviolet dan cahaya tampak) 	TW 3 Tahun 2023

Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan



Tahun 2022 sampai dengan TW III, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan



Nasional telah berhasil meningkatkan pelayanan pengujian Obat dan Makanan dengan nilai NPS 102,83% dengan Kriteria Baik.

IKSS 6.1 Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Pelayanan pengujian obat dan makanan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari PPPOMN. Persentase sampel obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu menjadi parameter untuk dapat menilai peningkatan pelayanan pengujian obat dan makanan di PPPOMN. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 tahun 2020, pengujian sampel di PPPOMN dilaksanakan oleh 2 (dua) UPT PPPOMN, yaitu Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM), sedangkan pengujian obat dalam rangka Prequalification WHO (PQ-WHO) diuji oleh Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

UPT Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang produk biologi, memiliki fungsi dalam pelaksanaan pengujian mutu produk biologi, pelaksanaan sertifikasi pelulusan vaksin, bulk vaksin dan produk biologi lainnya, pelaksanaan pengujian toksikologi obat dan makanan serta sistem rujukan laboratorium untuk pengujian produk biologi dan pengujian toksikologi. Sementara itu, UPT Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) melaksanakan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler atas sampel investigasi, penyidikan, pengkajian dan/atau rujukan obat dan makanan dalam lingkup nasional dan internasional.

Sampel yang diterima oleh UPT di Lingkungan PPPOMN adalah:

1. Sampel dari Direktorat Pengawasan karena adanya dugaan pelanggaran di lingkup nasional dan internasional, sampel vaksin impor, pendeteksian kandungan materi biologi/kimia/fisik jenis baru (yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya), perbedaan hasil uji antar laboratorium UPT BPOM dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Sampel dari Deputi IV dalam rangka investigasi/intelijen dan pembuktian tindak pidana/penyidikan dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Sampel dari UPT BPOM adalah sampel yang belum mampu diuji di semua UPT BPOM dalam rangka khusus/kasus/investigasi, sampel uji absah DNA, dan vaksin dalam rangka pengawasan.
4. Sampel pihak ketiga dalam rangka uji khusus/kasus/investigasi dan *lot release*.
5. Pengujian dalam rangka pengkajian obat dan makanan.

Hasil pengujian sampel yang dilaksanakan oleh UPT BPPB dan BPKOM digunakan untuk

tindak lanjut pengawasan terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat atau penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Oleh karena itu, hasil uji harus cepat diperoleh untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk dan melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat sehingga pemenuhan timeline pengujian menjadi sangat penting.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Pada tahun 2022 PPPOMN menargetkan jumlah sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sebanyak 1.900 sampel dengan target persentase pemenuhan timeline 93%. Data sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sampai dengan TW III tersaji sebagai berikut:

Tabel 20. Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

No.	UPT/ POKSI	Jumlah Sampel Masuk	Jumlah Sampel Selesai Uji	Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline	Persentase Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu
1	BPPB	1054	989	974	98,48 %
2	BPKOM	609	482	464	96,27%
3	KOBONAPPZA (WHO-PQ)	64	64	64	100%
Total		470	1.727	1.535	97,85%

Perhitungan realisasi dengan target TW III sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline}}{\text{Jumlah Sampel Selesai Uji}} \times 100\% \\ &= \frac{1502}{1535} \times 100 \% \\ &= 98,05 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{97,85 \%}{93 \%} \times 100 \% \\ &= 105,44 \% \end{aligned}$$

b. Perbandingan capaian indikator kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \% \text{IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{97,85\%}{93\%} \times 100\% \\ &= 105,44\% \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Persentase realisasi sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu pada TW III Tahun 2022 sebesar 97,85% dengan persentase capaian IKK sebesar 105,21%, dimana capaian ini melebihi dari target yang ditentukan, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan PPKM yaitu penurunan level 1 sampai level 2 selama TW III di Jakarta, sehingga porsi pegawai yang melaksanakan WFO lebih banyak dan berdampak pada peningkatan jumlah sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu. Selain itu, kontribusi peningkatan berasal dari permohonan pengujian lot realease vaksin yang meningkat.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Dalam pencapaian target persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu tahun 2022, akan menjaga ritme pekerjaan seperti yang sudah berjalan karena terbukti menghasilkan realisasi persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu yang melebihi target.

Tabel 21. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 6.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring bulanan terutama terkait reagen dan pereaksi untuk pengujian sampel yang ditindaklanjuti		Monev pengadaan perbulan reagen dan preaksi	Desember minggu ke 2

Pengujian spesimen COVID-19

Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, serta berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.04.20.153 tahun 2020 tentang penugasan kepada PPPOMN dan BPOM di Gorontalo untuk melaksanakan pemeriksaan uji COVID-19, maka PPPOMN memiliki satu tugas tambahan, yaitu melaksanakan pemeriksaan pada spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19. Pada tahun 2022 sampai dengan TW III jumlah spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19 yang dilakukan pengujian secara PCR sebanyak 10.917 sampel dan pengujian secara Whole Genome Sequencing (WGS) untuk mengetahui penyebaran mutasi virus COVID-19 sebanyak 2.556 sampel.

IKSS 6.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek, yang meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan dengan bobot 30%;
2. Profesionalisme SDM dengan bobot 18%;

3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik dengan bobot 15%;
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik dengan bobot 15%;
5. Konsultasi dan Pengaduan dengan bobot 15%; dan
6. Inovasi dengan bobot 7%.

Penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Target Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik PPPOMN pada tahun ini sebesar 4,30, dimana Indeks Pelayanan Publik (IPP) ini akan diukur di akhir tahun.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Capaian Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik PPPOMN ditetapkan pada triwulan IV tahun 2022.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Tabel 22. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 6.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Agar dalam pelaksanaan dan pelaporan FKP mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan UPP, antara lain keterlibatan unsur-unsur masyarakat yang dibuktikan dalam Berita Acara		Akan dilaksanakan forum konsultasi publik	Desember
2	Agar mensosialisasikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui berbagai metode dan media publikasi untuk menjangkau pengguna layanan secara lebih luas.		Akan dilaksanakan forum konsultasi publik	Desember
3	Pemberian reward/penghargaan sebaiknya dapat dilaksanakan perbulan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan		Akan mereviu SK tentang reward/penghargaan personal pelayanan publik	desember

Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang diikuti Secara Aktif

Tahun 2022 sampai dengan TW III, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil meningkatkan partisipasi Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan dengan ilai NPS 100,45 % dengan Kriteria BAIK

IKSS 7.1 Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/keahlian.

Sesuai Review Renstra PPPOMN 2020-2024 yang dilakukan pada akhir tahun 2021 dan dituangkan dalam RAPK tahun 2022, target jejaring yang diikuti secara aktif oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 adalah 71% dari 14 jejaring yang menjadi target di akhir RPJMN atau sebanyak 10 jejaring laboratorium. Sepuluh jejaring laboratorium tersebut yaitu:

1. LRPPPI pengujian Bahan Tambah Pangan dalam Pangan Olahan
2. LRPPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan
3. LRPPPI Pengujian Cemar Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan
4. LRPPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan
5. LRPPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan
6. LRPPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan
7. Jejaring ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC)
8. Jejaring ASEAN Cosmetics Testing Laboratory Committee (ACTLC)
9. Jejaring ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives
10. Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI)

Sesuai definisi operasional, yang dimaksud dengan “diikuti secara aktif” adalah penyelenggaraan/keikutsertaan dalam berbagai program/kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan dan bimbingan teknis, workshop, pertemuan/FGD; Uji Profisiensi; Uji Kolaborasi.

Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022, target pada triwulan (TW) III untuk indikator ini adalah 64% atau 9 jejaring laboratorium yang diikuti secara aktif. Sembilan jejaring tersebut, terdapat tujuh Jejaring telah diikuti secara aktif dan menjadi capaian realisasi pada tahun 2021 dan pada TW1 tahun 2022. Delapan Jejaring tersebut yaitu:

1. LRPPPI pengujian Bahan Tambah Pangan dalam Pangan Olahan
2. LRPPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan
3. LRPPPI Pengujian Cemar Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan

4. LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan
5. LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan
6. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan
7. Jejaring ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC)
8. Jejaring ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee (ACTLC)
9. ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Capaian indikator ini bersifat kumulatif dari capaian tahun sebelumnya, dan persentase dihitung terhadap target tahun 2024 (akhir RPJMN). Pemenuhan target jejaring pada TW III adalah 9 jejaring. Pada TW III ini terdapat penambahan satu jejaring yang diikuti secara aktif dibandingkan capaian TW II, yaitu Jejaring ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives. Sampai dengan TW III telah dilaksanakan juga beberapa kegiatan dalam rangka partisipasi aktif pada jejaring yang telah diikuti tahun sebelumnya yaitu antara lain pertemuan ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC), persiapan dan pelaksanaan kegiatan LRPPI kimia Pangan dan Mikrobiologi serta persiapan pembentukan Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia, serta pengadaan reagensia, prekursor, baku pembanding dan bahan fungsional. Perhitungan realisasi target indikator persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif pada TWIII tahun 2022 adalah sebagai berikut::

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Jejaring terealisasi pada TW III tahun 2022}}{\text{Jumlah target Jejaring sampai dengan tahun 2022}} \times 100\% \\ &= \frac{9}{14} \times 100\% \\ &= 64\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{64\%}{64\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \% \text{IKSS} &= \frac{\% \text{realisasi}}{\% \text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{64}{71} \times 100\% \\ &= 90,14\% \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Analisis Keberhasilan

Pemenuhan 9 (sembilan) Jejaring di TW III tahun 2022 sesuai dengan target yaitu sebesar 64%, sehingga persentase capaian IKSS adalah 100%. Pemenuhan ini tercapai karena adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dan dilaporkan setiap triwulan sehingga apabila terdapat kendala dapat segera diantisipasi dan percepatan untuk pemenuhan realisasi dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya perlu dilakukan monitoring yang lebih baik terkait pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggarannya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Selanjutnya perlu dilakukan monitoring evaluasi, dan melaksanakan kegiatan sesuai *plan of action* (POA) tersebut diharapkan target akan tercapai sesuai perencanaan, tambahan Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia di TW IV.

Tabel 23. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 7.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring evaluasi setiap bulan		Pelaksanaan 1 jejaring JLKI	Oktober

Sasaran Strategis 8:
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di PPPOMN

IKSS 8.1 Indeks RB PPPOMN

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Instansi Pemerintah POM serta Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.2.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi Badan POM tahun 2020-2024, PPPOMN- Badan POM senantiasa berupaya melakukan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Atas dasar tersebut, PPPOMN berupaya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai RB pada 6 (enam) area perubahan dalam membangun ZI (Zona Integritas) untuk menciptakan birokrasi bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik

PPPOMN akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2020-2024, PPPOMN senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian ZI, Opini BPK, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Target Indikator kinerja Indeks RB PPPOMN ditetapkan pada TW IV tahun 2022 84,7. Nilai indeks RB ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dan dikonversikan dengan rata-rata penilaian Unit Kerja Pusat dari KemenPANRB.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

penilaian Capaian indikator kinerja RB belum dilakukan pada TW III karena evaluasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM belum dilaksanakan oleh Inspektorat.

b. Perbandingan capaian indikator kinerja terhadap Target Tahun 2022

Belum ada realisasi Nilai RB PPPOMN Triwulan 3 tahun 2022 karena belum ada penilaian

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan atau kegagalan PPPOMN dalam mencapai target indikator kinerja Indeks RB Tahun 2022 baru dapat disimpulkan pada akhir TW IV atau setelah ada penilaian

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

PPPOMN melakukan monev internal setiap bulan untuk mengevaluasi progres rencana kerja kelompok kerja pada 6 (enam) area perubahan serta melakukan *update* terhadap lembar kerja evaluasi *self assessment* pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di instansi pemerintah. Diharapkan dengan adanya monev internal, nilai indeks RB dapat dicapai sesuai target indeks RB.

Tabel 24. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 8.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring evaluasi rencana aksi dan rencana prioritas untuk tiap POKJA per bulan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap awal bulan pada minggu pertama		

IKSS 8.2 Nilai AKIP PPPOMN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan monitoring, sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu implementasi area perubahan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP mengacu keputusan Keputusan Ka. Badan POM No. 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang dapat digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP antara lain:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Komponen-komponen tersebut dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen dengan variabel yaitu:

- a. Komponen: terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Kinerja.
- b. Sub-komponen: dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
- c. Kriteria: Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk

dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Tabel 25. Bobot Penilaian

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pengukuran Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pelaporan Kinerja	2,4	3,6	6	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	100

Keterangan: bobot komponen dan sub komponen diatas merupakan bobot penilaian untuk evaluasi SAKIP Satuan Kerja dan Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setiap sub komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Tata cara pengisian LKE diatur secara lebih detil melalui Keputusan Inspektur Utama.

Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Tabel 26. Interpretasi nilai SAKIP

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 - 100)	Sangat memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level pada Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis.
A (Nilai >80 - 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dan individu.
BB (Nilai >70 - 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60 - 70)	Baik.

Predikat	Interpretasi
	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada Unit Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai >50 - 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja.
C (Nilai >30 - 50)	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 - 30)	Sangat kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Pengukuran indeks AKIP PPPOMN belum dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) untuk melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta data dukungannya dalam rangka menuju WBBM pada seluruh unit kerja di BPOM. Nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian Unit Kerja pusat oleh KemenPANRB di bagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2021.

b. Perbandingan capaian indikator kinerja terhadap Target Tahun 2022

Belum ada realisasi Nilai AKIP PPPOMN Triwulan 3 tahun 2022 karena belum ada penilaian pengukuran indeks AKIP PPPOMN oleh Inspektorat Utama BPOM kegiatan yang dilaksanakan desk SAKIP dengan Tools baru.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Analisis penyebab keberhasilan

Pada tahun 2020, PPPOMN telah berhasil meraih nilai AKIP A, namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut dan meningkatkan nilai tersebut di tahun 2022.

Berdasarkan rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat, telah dilakukan:

1) Perencanaan

- a. Melengkapi dokumen RAPK dengan sub kegiatan/ komponen yang mendukung tercapainya masing-masing sasaran strategis sesuai dengan periodenya untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan
- b. Pemanfaatan data kinerja (perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pemanfaatan)

denga menyusun draft SOP pemberian reward dan punishment.

- 2) Pengukuran
 - a. Menyusun Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan pengujian Obat dan makan tentang Tim Penanggung jawab data kinerja
 - c. Pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi atau sistem yang mengolah data kinerja terarah
- 3) Evaluasi Internal meningkatkan efisiensi dan efektivitas Rapat Monev Anggaran dan Penyusunan Laporan Interim sehingga dapat memberikan dampak upaya percepatan untuk meningkatkan capaian IKU dapat lebih maksimal.
- 4) Capaian Kinerja Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP antara lain:

- menindaklanjuti semua rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat,
- melengkapi monev rencana aksi pada laporan evaluasi internal
- melengkapi cascading kinerja dari eselon 2 hingga individu dengan target dan realisasi.
- menyusun SOP pemberian reward dan punishment.

Tabel 27. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 8.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan tindak lanjut RTL SAKIP TA 2021	Sudah diupload di link inspektorat	SOP reward dan punishment	TW 4
2	Melengkapi hasil rekomendasi desk uji coba tools baru	Sudah diupload di link inspektorat		

Sasaran Strategis 9:
Terwujudnya SDM PPPOMN yang Berkinerja Optimal



IKSS 9.1 Indeks profesionalitas ASN PPPOMN

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen

PANRB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

Kualifikasi (25%)	• diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
Kompetensi (40%)	• diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
Kinerja (30%)	• diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
Disiplin (5%)	• diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Dari hasil perhitungan 4 dimensi Indeks Profesionalitas ASN tersebut, indeks Profesionalitas ASN dikategorikan menjadi:

- Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 : Tinggi;
- Nilai 71 - 80 : Sedang;
- Nilai 61 - 70 : Rendah; dan
- Nilai 0 - 60 : Sangat Rendah

a. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target TW III Tahun 2022

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM secara berkala setiap akhir tahun sehingga perhitungan capaian indeks professional ASN pada TW III belum dapat dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan yang menunjang IKSS 9 sudah dilaksanakan pada TW III, diantaranya sudah adanya pegawai yang menyelesaikan tugas belajar, melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis, serta mengikuti seminar/workshop. Perbandingan capaian indikator kinerja terhadap Target Tahun 2022

b. Perbandingan capaian indikator kinerja terhadap Target Tahun 2022

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM secara berkala setiap akhir tahun sehingga perhitungan capaian indeks professional ASN pada TW III belum dapat dilaksanakan

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

PPPOMN sangat konsen terhadap peningkatan kompetensi baik melalui Pendidikan

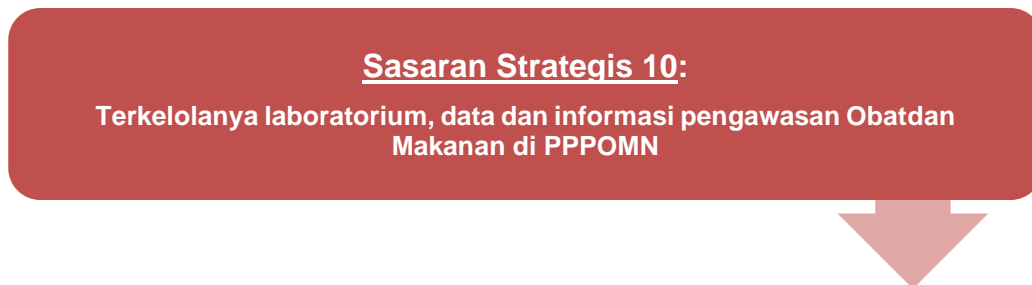
maupun pelatihan sesuai kebutuhan jabatannya para pegawainya, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang sedang menjalani tugas belajar serta sudah diusulkannya beberapa pegawai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terkait pengusulan tugas belajar ini, memang tidak bisa dilakukan dengan jumlah yang banyak mengingat perludisesuaikan dengan kebutuhan serta kapasitas organisasi.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal PPPOMN, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.

Tabel 28. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 9.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring evaluasi setiap bulan untuk pegawai oleh atasan masing-masing untuk dapat mencapai target 20 JP		Pegawai yang belum mencapai 20 JP mengikuti pelatihan baik Di PPSDM atau penyenggra pelatihan tertentu	TW IV



Tahun 2022 sampai dengan TW III, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil melakukan pengawalan pengelolaan laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN dengan Nilai NPS 111,11% dengan Kriteria BAIK.

IKSS 10.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal dihitung berdasarkan rata-rata dari penilaian berikut:

- (1) Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi

- a. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi – e-mail Aspek login dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu login per total akun individu.
- Aspek pemanfaatan (b) dengan bobot 40%, dihitung berdasarkan total akun unitaktif per total akun unit.
- Aspek pemanfaatan (c) dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu aktif per total akun individu.
- b. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – BOC
 - Persentase aktivitas akses BOC
 - Persentase aktivitas login BOC.
- c. Nilai indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC:
 - Jumlah frekuensi verifikasi data.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM melalui pemanfaatan email di PPPOMN pada tahun 2022 sampai dengan TW III berjalan dengan lancar dimana pada bulan April dari total akun 184 aktif sebanyak 130 (70%) dan bulan Mei dari 184 akun yang aktif sebanyak 122 (66%) dan pada bulan Juni dari total 181 akun akun yang aktif sebanyak 125 (69%).

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\
 &= \frac{2,50}{2,25} \times 100\% \\
 &= 111,1\%
 \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

Indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal telah mencapai target dan terlampaui. Terdapat perubahan tools penilaian indeks tersebut pada tahun ini sehingga berdampak pada capaian di TW III sebesar 111,1% sehingga capaian ini tidak dapat disimpulkan (>120%).

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

PPPOMN untuk terus meningkatkan pemakaian email corporate untuk surat -menyurat atau mengirimkan dokumen lewat

Tabel 29. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 10.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penggunaan Email Corporate	Himbauan terus disosialisasikan di setiap apel internal PPPOMN		
2	Usulan penyesuaian target indeks data	Dibatalkan karna ada penurunan realisasi pada tw III (2,50)		

IKSS 10.2 Persentase Status Akreditasi

Status akreditasi adalah predikat yang diberikan oleh KAN atau instansi yang berwenang atas hasil audit penerapan sistem mutu di PPPOMN dengan target hingga 2024:

1. ISO 17025:2017
2. ISO 9001:2015
3. PQ WHO
4. WHO NRA Benchmarking
5. ISO 17034:2016 (2022)
6. ISO 17043 (2023)
7. OHSAS 18001 (2024) Sistem Manajemen untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

penilaian Capaian indikator persentase Status Akreditasi belum dilakukan pada TW III karena penilaian di akhir tahun

b. Perbandingan capaian indikator kinerja terhadap Target Tahun 2022

Penilaian indikator ini dilakukan pada akhir tahun sehingga belum bisa dibandingkan capaian indikator kinerja terhadap Target Tahun 2022

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan atau kegagalan PPPOMN dalam mencapai target indikator persentase Status Akreditasi Tahun 2022 baru dapat disimpulkan pada akhir TW IV atau setelah ada penilaian

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

PPPOMN melakukan money internal setiap bulan untuk mengevaluasi progres rencana. Diharapkan dengan adanya money internal, persentase Status Akreditasi dapat dicapai sesuai target persentase status akreditasi.

Tabel 30. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 10.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemenuhan temuan pada Akreditasi ISO:17034	temuan yang berjumlah 14 Sudah diselesaikan 12 temuan	2 temuan sudah ditindak lanjuti menunggu evaluasi assessor	Nopember

Sasaran Strategis 11:

Terkelolanya Keuangan PPPOMN yang Akuntabel

Tahun 2022 sampai dengan TW III, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel dengan nilai NPS 93,34 % dengan Kriteria BAIK.

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu nilai kinerja anggaran PPPOMN.

IKSS 11.1 Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Penilaian IKPA tahun anggaran 2022 berubah dari 13 indikator menjadi 8 indikator, meliputi: Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW III Tahun 2022

Cara perhitungan indikator nilai kinerja anggaran PPPOMN adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai EKA = 70.31

Nilai IKPA = 93.69 nilai NKA = (40% x 93.16) + (60% x 70.13) = 79.34

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2022 TW III	2022(TW III)		
			Target	Realisasi	Capaian
Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	79,34	80	79,34	99,17

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{79,34}{94,1} \times 100\% \\ &= 84,31\% \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Jika dibandingkan dengan realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2022 capaian pada Triwulan III mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan nilai capaian Evaluasi Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA lebih tinggi dibanding pada tahun 2022. Tujuan pelaksanaan monitoring penilaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran PPPOMN dengan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana serta taat pada ketentuan yang berlaku serta menjamin pencapaian output pelaksanaan anggaran PPPOMN yang optimal.

Nilai dari 8 Indikator penilaian IKPA PPPOMN adalah sebagai berikut :

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	175	063	632420	PUSAT PENGEMBANGAN PENGIJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Nilai	100.00	86.40	66.99	99.05	100.00	92.78	100.00	91.99	89.22	100%	89.22
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.64	13.40	9.90	10.00	9.28	5.00	23.00			
					Nilai Aspek		93.20			91.76		91.99				

Disclaimer:
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Dari 8 Indikator diatas ada 3 Indikator yang mendapatkan nilai 100, dan 4 Indikator yang mendapatkan Nilai dibawah 100 yaitu :


1. Deviasi halaman III DIPA
2. Penyerapan Anggaran
3. Belanja Kontraktual
4. Pengelolaan UP/TUP

Penjelasan dari 4 Indikator yang nilainya dibawah 100 adalah sebagai berikut :

1. Deviasi Halaman III DIPA.

Nilai Deviasi halaman III DIPA Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional belum mendapatkan nilai yang optimal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara rencana yang ditetapkan dan realisasi. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini salah satunya adalah pengadaan belanja bahan seperti reagensia, suku cadang, bahan fungsional, baku pembanding dan bahan persediaan lainnya mengalami keterlambatan pengiriman. Bahan persediaan yang semula terkonfirmasi ready stok dikarenakan banyak juga permintaan sehingga menjadi indet. Hal ini menyebabkan perubahan rencana penarikan karena menunggu proses barang datang dan pembayaran yang bergeser.

2. Penyerapan anggaran belum optimal dikarenakan realisasi belum sesuai dengan target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan yaitu 60% pada triwulan III. Hal ini dikarenakan banyak pengadaan belanja modal yang direalisasikan pada akhir tahun.
3. Belanja Kontraktual dengan nilai 96,31 belum optimal hal ini dikarenakan , ada 3 komponen pembentuk nilai belanja kontraktual dengan nilai dibawah 100 dikarenakan :
 - Adanya keterlambatan 1 hari untuk pendaftaran kontrak untuk Pengadaan Jasa Event



Organizer dalam rangka Pembahasan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium Badan POM hal ini dikarenakan adanya penyesuaian pada sistem perintegrasian SAKTI tahun 2022 dan Pengadaan Sewa Rumah Dinas Kepala PPPOMN dalam rangka Belanja Sewa Rumah untuk Pejabat Eselon II.

- Pengadaan Jasa Event Organizer dalam rangka Pembahasan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium Badan POM senilai Rp. 131,375,860 hal ini dikarenakan adanya usulan revisi yang belum bisa diterbitkan sebelum tanggal pendaftaran kontrak.
 - Pengadaan Jasa Event Organizer dalam rangka Workshop Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi senilai 152,068,113 dikarenakan ada kesalahan dalam mencantumkan akun pada dokumen kontrak.
4. Pengelolaan UP/TUP dengan nilai 93,74 , hal ini dikarenakan adanya 1 (satu) kali keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan UP/TUP pada bulan Maret.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pengelolaan keuangan dan anggaran
2. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui monev DJA;
3. Revisi anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana; dan
4. Penyesuaian target kinerja dan rencana aksi.

Upaya tindak lanjut untuk tercapainya indikator ini di triwulan berikutnya adalah:

1. Penyerapan Anggaran yaitu memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta melakukan percepatan belanja khususnya belanja barang dan modal.
2. Melakukan pemecahan kontrak atau PO terhadap barang-barang yang indent, sehingga untuk barang persediaan yang sudah datang dapat dilakukan pembayaran.
3. Belanja Kontraktual yaitu dengan memperhatikan batas waktu pendaftaran kontrak dan mengidentifikasi serta mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang dan memastikan pengadaan barang dan jasa yang sifatnya sekaligus dan tepat waktu.
4. Pengelolaan UP dan TUP meliputi menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan satker dan menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Tabel 31. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi TW III IKSS 11.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	barang dan modal Meningkatkan serapan anggaran dengan memperbaiki perencanaan dan melaksanakan kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta melakukan percepatan belanja khususnya belanja		Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa	TW 4
2	Melakukan pemecahan kontrak atau PO terhadap barang-barang yang indent, sehingga untuk barang persediaan yang sudah datang dapat dilakukan pembayaran		Sedang dalam proses identifikasi terhadap barang yang inden untuk dilakukan penyesuaian	TW 4
3	Memperhatikan pendaftaran belanja Kontraktual yaitu dengan memperhatikan batas waktu pendaftaran kontrak		mengidentifikasi serta mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang dan memastikan pengadaan barang dan jasa yang sifatnya sekaligus dan tepat waktu	TW 4
4	mengelola UP dan TUP secara tepat waktu menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan satker dan menggunakan		menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan satker dan menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien	TW 4

3.2 Capaian Kinerja Anggaran TW III Tahun 2022

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2022 pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 PPMN memperoleh anggaran APBN sebesar Rp85.957.671.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan, dengan rincian rupiah murni Rp42.329.860.000,- (empat puluh dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan PNPB Rp5.501.327.000 (Lima milyar lima lima ratus satu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan program dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000 (tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) . Selama dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret telah dilakukan 3 kali Revisi POK dan 3 kali revisi DIPA. Rincian realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 13.



Tabel 32. Capaian dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI						HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK			KEUANGAN						
			Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)					
4133.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	22,000,000,000										
4133.AFA.001	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang	22,000,000,000									Nilai anggaran yang di blokir 1,215,780,000	
51	Pengembangan Metode Pengujian Obat dan Makanan	6,646,994,000	200	MA	123	MA						
A	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Kelompok Substansi Pengembangan Pengujian Kimia Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	412,086,000					71.67	279,672,012	67.87			Tidak ada hambatan dan kendala
B	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Kelompok Substansi Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	760,885,000					81.40	666,595,187	87.61			Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI						HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK			KEUANGAN						
			Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)					
C	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Metode Analisis Kelompok Substansi Pengembangan Pengujian Kimia Pangan dan Air	764,140,000					66.67	493,306,701	64.56			Tidak ada hambatan dan kendala
D	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Laboratorium Kelompok Substansi Pengembangan Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler	962,190,000					81.40	818,018,109	85.02			Tidak ada hambatan dan kendala
E	Workshop Sidang Pleno Metode Analisis	0	0	Keg	0	Keg		0				Tidak ada hambatan dan kendala
F	Restorasi dan Digitalisasi Arsip Vital	63,095,000	2	Keg	1	Keg	50.00	32,895,000	52.14			Tidak ada hambatan dan kendala
G	Pengadaan Bahan Bakar Insenerator	0	2	Keg	0	Keg	0.00	0				Tidak ada hambatan dan kendala
H	Administrasi Kegiatan Perkantoran	1,745,810,000	50	Keg	38	Keg	76.00	1,314,225,895	75.28			Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
I	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Laboratorium Produk biologi dan toksikologi	477,400,000	15	Keg	10	Keg	66.67	307,025,606	64.31				Tidak ada hambatan dan kendala
J	Pengembangan Kapasitas Organisasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	537,835,000	1	Keg	1	Keg	100.00	536,240,000	99.70				Tidak ada hambatan dan kendala
52	Peningkatan kapasitas pengujian	15,006,066,000											
2	Pengembangan Laboratorium BSL 3	14,083,722,000	20	Keg	3	Keg	15.00	1,602,895,267	11.38				Proses Lelang alat containment sudah dilakukan dan sedang dalam tahap pelaksanaan lelang konstruksi BSL 3
B	Pengadaan Pustaka	100,965,000	2	Keg	0	Keg	0.00	0	0.00				sedang dalam tahap pembayaran
C	Workshop Staf Bidang Kimia Obat dan Napza	65,815,000	2	Keg	2	Keg	100.00	64,086,580	97.37				Pembelian reagen sudah

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
													dilakukan menunggu pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan
D	Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	86,190,000	8	Keg	5	Keg	62.50	54,276,990	62.97				Pembelian reagen sudah dilakukan menunggu pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan
E	Workshop Bidang Analisis Bidang Kimia Pangan dan Air	70,510,000	6	Keg	4	Keg	66.67	42,796,050	60.70				Tidak ada hambatan dan kendala
F	Workshop Bidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler	177,196,000	6	Keg	5	Keg	83.33	150,741,180	85.07				Tidak ada hambatan dan kendala
G	Workshop Sub Bagian Tata Usaha	10,720,000	1	Keg	1	Keg	100.00	10,687,000	99.69				Menunggu pertanggung jawaban di keuangan
H	Workshop BSL 3 PPPOMN	3,080,000	1	Keg	0	Keg	0.00	0	0.00				Tidak ada hambatan

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
													dan kendala
I	Penerapan Sistem Mutu (Surveilen/ Audit Internal)	285,000,000	20	Keg	7	Keg	35.00	94,644,620	33.21				Tidak ada hambatan dan kendala
53	Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi dalam rangka peningkatan pengembangan pengujian	346,940,000											
A	Kerja Sama Antar Satker di BPOM/Instansi Pemerintah/Swasta/ Lembaga Terkait	99,973,000	45	Keg	29	Keg	64.44	67,838,386	67.86				Tidak ada hambatan dan kendala
4133.BI A	Pengawasan dan Pengendalian Produk	9,903,000,000											Nilai Blokir 3816275000
	Lokasi : Kota JAKARTA PUSAT												
4133.BI A.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar	3,000,000,000											
51	Pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium	3,000,000,000											
A	Rekalibrasi Alat Standar/Peralatan Laboratorium	143,730,000	8	Keg	7	Keg	87.50	120,228,000	83.65				Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)						
A	Pengujian Sampel Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	1,507,177,000	12	Keg	6	Keg	50.00	625,299,329	41.49				Tidak ada hambatan dan kendala
B	Penanganan / Pencegahan Covid 19	495,000,000	8	Keg	7	Keg	87.50	386,530,576	78.09				Tidak ada hambatan dan kendala
C	Workshop/Pelatihan Staf Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	143,380,000	6	Keg	5	Keg	83.33	125,000,401	87.18				Tidak ada hambatan dan kendala
D	Konsultasi Permasalahan dan Kendala Pengujian Khusus Obat dan Makanan	27,680,000	4	Keg	2	Keg	50.00	11,170,530	40.36				Tidak ada hambatan dan kendala
E	Konsultasi Perencanaan Pengembangan Laboratorium Rujukan Nasional/ Internasional	40,000,000	1	Keg	0	Keg	0.00	0	0.00				Tidak ada hambatan dan kendala
F	Pengadaan Kapasitas Laboratorium/Refreshment/Replacement	266,920,000	4	Keg	2	Keg	50.00	99,998,000	37.46				Tidak ada hambatan dan kendala
G	Penyebaran Informasi Layanan Obat dan Makanan	172,700,000	15	Keg	3	Keg	20.00	39,183,620	22.69				Tidak ada hambatan dan kendala
H	Pengujian Sampel PQ WHO	375,000,000	7	Keg	5	Keg	71.43	253,162,794	67.51				

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
I	Pemeliharaan Pengakuan WHO	42,992,000	5	Keg	1	1	20.00	8,581,800	19.96				Tidak ada hambatan dan kendala
J	Jaminan Mutu Hasil Pengukuran (Kalibrasi alat dalam rangka PQ WHO)	163,623,000	1	Keg	0	Keg	0.00	0	0.00				Tidak ada hambatan dan kendala
52	Pengujian di balai pengujian Produk Biologi	3,668,528,000	800										
A	Pengujian laboratorium sampel produk biologi dan toksikologi	1,047,750,000	11	Kegiatan	7	Kegiatan	63.64	634,950,902	60.60				Tidak ada hambatan dan kendala
B	Laboratorium Kontrak WHO Laboratorium Produk Biologi	15,750,000	8	Kegiatan	7	Kegiatan	87.50	13,651,837	86.68				Tidak ada hambatan dan kendala
C	Pengujian sampel dalam Rangka PQ WHO Balai Pengujian Produk Biologi	140,000,000	2	Kegiatan	1	Kegiatan	50.00	49,465,818	35.33				Tidak ada hambatan dan kendala
D	Workshop Staf Balai Pengujian Produk Biologi	347,400,000	5	Kegiatan	2	Kegiatan	40.00	113,323,840	32.62				Tidak ada hambatan dan kendala
E	Pengujian Sampel Kasus	156,750,000	5	Kegiatan	4	Kegiatan	80.00	118,145,625	75.37				Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)					
F	Penanganan/Pencegahan Covid 19	379,750,000	12	Kegiatan	2	Kegiatan	16.67	312,683,342	82.34				Tidak ada hambatan dan kendala
G	Peningkatan Kapasitas Lab/Refreshment/Replacement	968,358,000	8	Kegiatan	3	Kegiatan	37.50	316,057,905	32.64				Tidak ada hambatan dan kendala
H	Pelayanan Publik PPPOMN	612,770,000	18	Kegiatan	3	Kegiatan	16.67	93,890,520	15.32				Tidak ada hambatan dan kendala
4133.CA B	Layanan Sarana Internal	2,075,187,000											
	Lokasi : KOKA JAKARTA PUSAT												
4133.CA B.001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
53	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	2,075,187,000											
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1,978,317,000	20	UNIT	2	UNIT	10.00	210,100,838	10.62				Tidak ada hambatan dan kendala
B	Pengadaan Pustaka Balai Pengujian Obat dan Makanan	16,000,000	4	UNIT	1	UNIT	25.00	4,730,000	29.56				Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
C	Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Publik PPPOMN	80,870,000	20	UNIT	0	UNIT	0.00	0	0.00				Tidak ada hambatan dan kendala
						0							
4133.CAN	Layanan Sarana Internal	753,000,000											
	Lokasi : KOKA JAKARTA PUSAT												
4133.CAN.001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	753,000,000							0.00				
51	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	753,000,000											
A	Pengadaan Sarana Pengujian	753,000,000	50	UNIT	48	UNIT	96.00	723,199,817	96.04				Tidak ada hambatan dan kendala
4133.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	2,400,000,000											
	Lokasi : Kota JAKARTA PUSAT												
4133.DDA.001	Baku Pembanding yang dikembangkan	2,400,000,000							0.00				
51	Pengembangan Baku Pembanding	1,791,108,000											
A	Pengadaan Pengembangan Baku Pembanding Nasional Tahun 2022	1,566,578,000	26	Kegiatan	19	Kegiatan	73.08	1,247,713,121	79.65				Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)						
B	Pengembangan Baku Pembanding Mikroba	160,000,000	20	Kegiatan	19	Kegiatan	95.00	155,290,659	97.06				Tidak ada hambatan dan kendala
C	Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Baku Pembanding	45,250,000	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.00	44,769,588	98.94				Tidak ada hambatan dan kendala
D	Perencanaan Pengembangan BPF	6,480,000	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.00	6,160,000	95.06				Tidak ada hambatan dan kendala
E	Penetapan dan Evaluasi Harga Pokok Produksi Baku Pembanding	1,760,000	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.00	1,300,000	73.86				Tidak ada hambatan dan kendala
F	BPF / BPL User forum	11,040,000	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.00	11,040,000	100.00				Tidak ada hambatan dan kendala
52	Koordinasi dalam rangka Pengembangan Baku Pembanding	152,040,000											
A	Pembahasan percepatan pemenuhan baku pembanding dengan akademik, industri dan instansi lain	10,800,000	4	Keg	1	Keg	25.00	1,959,000	18.14				Tidak ada hambatan dan kendala
B	Pembahasan Sintesa/Isolasi dan	1,320,000	1	Keg	0	Keg	0.00	0	0.00				Tidak ada hambatan

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI						HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK			KEUANGAN						
			Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)					
51	Koordinasi dalam rangka pengembangan jejaring pengujian	1,355,250,000										
A	Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Obat (ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee /APTLC)	10,920,000	6	Keg	2	Keg	33.33	0	0.00		Tidak ada hambatan dan kendala	
B	Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Pangan (ASEAN Food Testing Laboratory Committee /AFTLC)	10,920,000	3	Keg	2	Keg	66.67	7,057,700	64.63		Tidak ada hambatan dan kendala	
C	Jejaring Laboratorium Kosmetik	127,810,000	12	Keg	4	Keg	33.33	2,200,000	1.72		Tidak ada hambatan dan kendala	
E	Launching JLKI		3	Keg	0	Keg	0.00	0	0.00		Tidak ada hambatan dan kendala	
F	Inisiasi Jejaring Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		5	Keg	0	Keg	0.00	0	0.00		Tidak ada hambatan dan kendala	
G	Pertemuan Teknis Jejaring Pengujian Pangan Indonesia	80,600,000	8	Keg	1	Keg	12.50	1,144,000	1.42		Tidak ada hambatan dan kendala	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
H	Pengujian Sampel dalam rangka Jejaring Pengujian Pangan/Ruang lingkup	95,000,000	5	Keg	1	Keg	20.00	5,600,000	5.89				Tidak ada hambatan dan kendala
I	Penguatan Laboratorium BPOM dalam Jejaring ASEAN Pangan(AFRL Food Additive)/workshop AFRL	179,250,000	4	Keg	2	Keg	50.00	66,934,815	37.34				Tidak ada hambatan dan kendala
J	Pelatihan teknis Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (LRPPI) (1 Kegiatan)	137,386,000	10	Keg	1	Keg	10.00	38,904,170	28.32				Tidak ada hambatan dan kendala
K	Pelatihan teknis Jejaring Mikrobiologi Obat (1 Kegiatan)	168,443,000	6	Keg	2	Keg	33.33	46,410,987	27.55				Tidak ada hambatan dan kendala
L	Pertemuan LRPPI (Jejaring Lab) MBM	11,515,000	1	Keg	1	Keg	100.00	9,715,000	84.37				Tidak ada hambatan dan kendala
M	Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler dalam rangka Jejaring	184,800,000	8	Keg	4	Keg	50.00	120,684,645	65.31				Tidak ada hambatan dan kendala
N	Pelatihan LRPPI (Jejaring Laboratorium)	174,450,000	6	Keg	4	Keg	66.67	94,854,150	54.37				Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
O	Pertemuan Dalam rangka Penguatan Jejaring Laboratorium PPPOMN	58,071,000	3	Keg	0	Keg	0.00	0	0.00				Tidak ada hambatan dan kendala
52	Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPOM	508,000,000											
A	Uji Profisiensi yang Diikuti BB/BPOM dilaboratorium Kimia dan Biologi	508,000,000	12	Keg	6	Keg	50.00	303,008,502	59.65				Tidak ada hambatan dan kendala
53	Monitoring/Evaluasi Uji Profisiensi	36,750,000											
A	Koordinasi/Evaluasi Penyelenggaraan UP	36,750,000	3	Keg	1	Keg	33.33	5,600,000	15.24				Tidak ada hambatan dan kendala
4133.TAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8,800,000,000											
	Lokasi : Kota JAKARTA PUSAT												
4133.TAH.001	Sistem Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	6,000,000,000											
51	Pemenuhan Grand Desain Penguatan Laboratorium	6,000,000,000							0.00				Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
	Pengujian Obat dan Makanan Badan POM												
A	Peningkatan Ruang Lingkup Sesuai Grand Desain	648,870,000	3	Kegiatan	1	Kegiatan	33.33	1,906,000	0.29				Tidak ada hambatan dan kendala
B	Pengadaan LIMS	4,022,592,000	8	Kegiatan	0	Kegiatan	0.00	0	0.00				Tidak ada hambatan dan kendala
C	Sosialisasi Grand Desain Laboratorium BADAN POM	1,008,600,000	2	Kegiatan	0	Kegiatan	0.00	0	0.00				Tidak ada hambatan dan kendala
D	Rapat Persiapan Penyusunan Grand Design Laboratorium BPOM	319,938,000	10	Kegiatan	1	Kegiatan	10.00	23,702,000	7.41				Tidak ada hambatan dan kendala
4133.TA H.002	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP	2,800,000,000											
51	Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja	343,080,000											
A	Penilaian dan Money Pemenuhan SKL	47,440,000	6	Keg	1	Keg	16.67	864,000	1.82				Tidak ada hambatan

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)						
	PPPOMN dan Pembahasan dalam rangka peningkatan laboratorium BPOM												dan kendala
B	Pembahasan Regionalisasi Laboratorium Badan POM	295,640,000	8	Keg	6	Keg	75.00	217,394,520	73.53				Tidak ada hambatan dan kendala
52	Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup	1,071,814,000											
A	Pelatihan Dalam Negeri	819,974,000	66	Keg	18	Keg	27.27	223,926,007	27.31				Tidak ada hambatan dan kendala
C	Penilaian kemampuan laboratorium BB/Balai POM/reassessmen BB/Balai POM sesuai standar	182,640,000	27	Keg	21	Keg	77.78	144,800,605	79.28				Tidak ada hambatan dan kendala
D	PENILAIAN KEMAMPUAN PENGUJIAN LOKA POM	69,200,000	10	Keg	0	Keg	0.00	0	0.00				Tidak ada hambatan dan kendala
53	Peningkatan kinerja laboratorium	1,385,106,000											
A	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Bimtek KOBONAPPZA	114,780,000	10	Keg	5	Keg	50.00	57,562,570	50.15				Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
B	Peningkatan Kapasitas Pengujian di Loka POM (Rapid Test Obat Nappza) -Poksi KOBONAPPZA	112,980,000	8	Keg	8	Keg	100.00	98,820,878	87.47				Tidak ada hambatan dan kendala
C	Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk Laboratorium Badan POM	142,840,000	10	Keg	8	Keg	80.00	124,490,141	87.15				Tidak ada hambatan dan kendala
D	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Kimia Pangan dan Air	151,094,000	10	Keg	8	Keg	80.00	106,319,486	70.37				Tidak ada hambatan dan kendala
E	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Mikrobiologi	158,836,000	9	Keg	9	Keg	100.00	155,234,301	97.73				Tidak ada hambatan dan kendala
F	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Biologi Molekuler (DNA Spesifik Spesies)	128,236,000	9	Keg	9	Keg	100.00	118,831,638	92.67				Tidak ada hambatan dan kendala

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
G	Workshop Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium	576,340,000	15	Keg	8	Keg	53.33	310,757,054	53.92				Tidak ada hambatan dan kendala
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	38,126,484,000											
4112	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana	38,126,484,000											
6384.EA A	Layanan Perkantoran	38,126,484,000											
	Lokasi : Kota JAKARTA PUSAT												
6384.EB A	Layanan Perkantoran [Base Line]	38,126,484,000											
1	Gaji dan Tunjangan	25,550,000,000											
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25,550,000,000						19,370,122,460	75.81				
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	14,000,000,000											
A	PERAWATAN KENDARAAN BERMOKOR RODA 2	7,280,000	12	BLN	9	BLN	75.00	917,525	12.60				sedang dalam proses pembayaran
B	PERAWATAN KENDARAAN BERMOKOR RODA 4	120,000,000	12	BLN	9	BLN	75.00	79,727,702	66.44				sedang dalam proses pembayaran

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
			FISIK				KEUANGAN						
			Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		Progres %	Rupiah (Rp) RM	Persentase (%)				
C	PERAWATAN PERALATAN KANTOR	3,287,250,000	12	BLN	9	BLN	75.00	2,618,099,274	79.64				sedang dalam proses pembayaran
D	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	1,324,370,000	12	BLN	9	BLN	75.00	1,164,871,535	87.96				sedang dalam proses pembayaran
E	LANGGANAN DAYA DAN JASA	4,668,060,000	12	BLN	9	BLN	75.00	3,625,891,540	77.67				sedang dalam proses pembayaran
F	Administrasi Kegiatan Perkantoran	4,593,040,000	12	BLN	9	BLN	75.00	3,380,737,559	73.60				
TOTAL		87,381,187,000					52.36	45,785,898,268	52.40				

Tabel 33. Capaian Indikator

Sasaran/KRO	Indikator	Target Tahunan KRISNA RENJA	Satuan	REALISASI S.D SEPTEMBER							
				Target September	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian terhadap target s.d September	%Capaian terhadap target tahunan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/ Pengujian	81	Persen	79			79.51	100.65	98.16	masih dalam proses pengisian monitoring dan evaluasi serta data dukungnya ditargetkan selesai pada tanggal 7 September 2022	Pendampingan untuk Balai Tarakan dilakukan Bulan Oktober 2022
	Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM	20	Persen	12			10	83.33	50.00	adanya automatic adjustment pada Output Grand Design Laboratorium Badan POM mengakibatkan salah satu kegiatan dengan anggaran besar dibatalkan (LIMS).	akan diusulkan penurunan target

Sasaran/KRO	Indikator	Target Tahunan KRISNA RENJA	Satuan	REALISASI S.D SEPTEMBER								
				Target September	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian terhadap target s.d September	%Capaian terhadap target tahunan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	
											jika adanya pembukaaan automatic adjusment pada TW 4, kegiatan tersebut (pengadaan LIMS) tidak memungkinkan dilaksanakan karena keterbatasan waktu.	
Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN</i>	91	Indeks				92.64		101.80	Perhitungan capaian pada akhir tahun	Meningkatkan kualitas layanan terutama layan yang masih memperoleh nilai di bawah 90, yaitu jasa uji profisiensi dan pelayanan hewan uji di PPPOMN	

Sasaran/KRO	Indikator	Target Tahunan KRISNA RENJA	Satuan	REALISASI S.D SEPTEMBER								
				Target September	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian terhadap target s.d September	%Capaian terhadap target tahunan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	
Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP	<i>Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i>	80	0								Perhitungan capaian pada akhir tahun	revisi cut off capaian SKL BB/Balai BPOM
Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	<i>Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan</i>	82.6	Metode Analisis	79.3	1774	2213	80.16	101.09	97.05	Tidak ada hambatan dan kendala	Poksi Kobonapza :17 Poksi KPOA :5 Poksi MBM :11 Poksi OTKOSK:13 UPT Produk Biologi :3 d TW 2 telah dilakukan pengembangan MA sebanyak 49 MA Total Pengembangan MA di Bulan September =	

Sasaran/KRO	Indikator	Target Tahunan KRISNA RENJA	Satuan	REALISASI S.D SEPTEMBER							
				Target September	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian terhadap target s.d September	%Capaian terhadap target tahunan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
											7 MA Total Januari s/d September 123 MA
	<i>Persentase Baku Pemanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan</i>	81.5	Baku Pemanding	78.24	970	1227	79.05	101.04	97.00	Tidak ada hambatan dan kendala	Jumlah Baku Pemanding yang dikembangkan tahun 2022 : KESIMPULAN : PPPOMN : Selesai : 49 Proses : 12 BB YOGYAKARTA : Selesai : 16 Proses : 7 Total selesai Kimia : 49 + 16 = 65 Total proses kimia : 12 + 7 = 19 Total selesai

Sasaran/KRO	Indikator	Target Tahunan KRISNA RENJA	Satuan	REALISASI S.D SEPTEMBER							
				Target September	Pembelian	Penyebut	Realisasi	%Capaian terhadap target s.d September	%Capaian terhadap target tahunan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
											Kimia dan Mikrobiologi : 65 + 20 = 85
Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	Alat Laboratorium	75	2452	3154	77.74	103.66	77.74	Alat Laboratorium yang dikalibrasi pada Bulan September adalah 204 alat Lab, sehingga sampai dengan bulan September alat lab yang dikalibrasi adalah 2452	pada bulan oktober di perkirakan ada penambahan alat yang dikalibrasi 250 alat
Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	<i>Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu</i>	93	sampel	93	1498	1531	97.84	105.21	105.21		BPKOM: Total sampel diterima Jan sd Sept 2022: 609 Total sampel diuji Jan-Sept 2022:482 Total

Sasaran/KRO	Indikator	Target Tahunan KRISNA RENJA	Satuan	REALISASI S.D SEPTEMBER							
				Target September	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian terhadap target s.d September	%Capaian terhadap target tahunan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
											<p>sampel diuji tepat waktu Jan-Sept 2022: 464</p> <p>BPPB : Total sampel diterima Jan sd Sept 2022: 1054 Total sampel diuji Jan-Sept 2022:989 Total sampel diuji tepat waktu Jan-Sept 2022: 974</p> <p>sampel PQ WHO = Total sampel diterima Jan sd Sept 2022: 60 Total sampel diuji Jan-Sept</p>

Sasaran/KRO	Indikator	Target Tahunan KRISNA RENJA	Satuan	REALISASI S.D SEPTEMBER							
				Target September	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian terhadap target s.d September	%Capaian terhadap target tahunan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
											2022: 60 Total sampel diuji tepat waktu Jan-Sept 2022: 60 Total sampel yang diuji (482+989+60)=1531 sampel yang memenuhi timeline (1498)
	<i>Indeks Pelayanan Publik PPPOMN</i>	4.3	<i>Nilai</i>				4.77	100.45	90.54		meningkatkan kualitas layanan, agar dapat diusulkan mendapatkan pelayanan prima dari MenpanRB
Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang	<i>Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang</i>	71	jejaring	64	9	14	64.29	100.45	90.54		jejaring yg LRPPI Mikrobiologi tgl 17-21 Oktober, Workshop

Sasaran/KRO	Indikator	Target Tahunan KRISNA RENJA	Satuan	REALISASI S.D SEPTEMBER								
				Target September	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian terhadap target s.d September	%Capaian terhadap target tahunan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	
berpartisipasi aktif	<i>diikuti secara aktif</i>											AFRL dilaksanakan di tanggal 14-18 November 2022
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Indeks RB PPPOMN	87.6	nilai								Perhitungan capaian pada akhir tahun	Monev LKE ZI PPPOMN, rencana aksi target prioritas secara berkala untuk masing2 pokja
	Nilai AKIP PPPOMN	78.7	nilai								Belum ada penilaian, pada bulan september dilakukan desk persiapan dengan tools baru	Pemenuhan rekomendasi desk terbaru
Terwujudnya SDM PPPOMN yang	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.25	Indeks								Perhitungan capaian pada akhir tahun	monitoring pemenuhan kompetensi personel (pemenuhan

Sasaran/KRO	Indikator	Target Tahunan KRISNA RENJA	Satuan	REALISASI S.D SEPTEMBER								
				Target September	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian terhadap target s.d September	%Capaian terhadap target tahunan	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	
berkinerja optimal											20 jam pelajaran) per tahun	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Persentase Status Akreditasi	71	nilai								Proses assesmen lapangan ISO 17034:2016 telah dilakukan , saat ini dalam proses tindakan perbaikan	Menyelesaikan tindakan perbaikan
	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2.25	Indeks	2.25			2.5	111.11	111.11		Akan dilakukan usulan perubahan target indeks pengelolaa n data	
Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94.1	nilai	80			79.34	99.175	84.31	Nilai EKA = 70.31 Nilai IKPA = 93.69 nilai NKA = (40%x 93.16)+(60%x70.13) = 79.342	Monitoring keuangan dan pengadaan PBJ	

Tabel 34. Capaian Output

No	Kegiatan	Satuan	Volume Output			Anggaran			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN per TW (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Kemitraan	Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif	Jejaring	10	9	90.00	1,491,709,000	847,488,114	56.81
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	MA	200	123	61.50	20,784,220,000	18,931,842,085	91.09
3	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar	Alat Lab	3,154	2,454	77.81	938,441,000	753,146,255	80.26
		Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	sampel	1,900	1,498	78.84	5,148,284,000	3,355,844,973	65.18
4	Sarana Bidang Kesehatan	Layanan Sarana Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan	Paket	90	90	100.00	2,075,187,000	214,830,838	10.35
							725,000,000	723,199,817	99.75
5	Penelitian dan Pengembangan Produk	Baku Pembanding yang dikembangkan	Baku Pembanding	95	85	89.47	2,015,369,000	1,858,574,838	
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	Laboratrium	26	progres 27 Balai		2,536,010,000	1,559,001,200	75.00
		Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	Laboratrium	1	progres 60%		997,588,000	272,580,000	27.32
7	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran PPPOMN	Layanan	1	progres 75%		39,550,000,000	30,396,220,533	76.86
							76,261,808,000	58,912,728,653	77.25

BAB IV - PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan 2 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada TW III tahun 2022, yang mengacu pada Renstra PPPOMN tahun 2020-2024 yang mempunyai 11 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja.

1. Dari 16 indikator utama tersebut baru 11 (sebelas) indikator yang sudah dilakukan perhitungan capaiannya, sedangkan 5 (lima) indikator yaitu : (Persentase pemenuhan laboratorium BB/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Indeks RB PPPOMN, Nilai AKIP PPPOMN, Indeks profesionalitas ASN PPPOMN, dan Status akreditasi) diukur pada akhir tahun.
2. Hasil pengukuran capaian indikator didapatkan nilai sebagai berikut.

Kriteria baik $90\% \leq x < 110\%$ yaitu

- Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium (100,76%)
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN (101,80%)
- Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan (101,09%)
- Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan (101,04%)
- Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar (103,66%)
- Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu (105,21%)
- Indeks pelayanan publik PPPOMN (110,93%)
- Persentase Jejaring pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif (100%)
- Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal (111,11%)
- Nilai kinerja anggaran PPPOMN (93,34%)

Kriteria cukup $70\% \leq x < 90\%$

- ❖ Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM (83,3%)

3. Kegiatan yang pengukurannya di akhir tahun

5 indikator yang pengukurannya dilakukan di akhir tahun yaitu:

- Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- Indeks RB PPPOMN
- Nilai AKIP PPPOMN
- Indeks profesionalitas ASN PPPOMN
- Status akreditasi

Dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan PPPOMN TW III Tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 87.381.187.000,- (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 48,993,160,546, - (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau 56.07%. PPPOMN berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja pada setiap tahun sehingga sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target pada RENSTRA.

4.2 Saran

Adapun Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja PPPOMN sebagai berikut:

1. Melakukan Review PoA dan update halaman III DIPA PPPOMN
2. Penyerapan Anggaran yaitu memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta melakukan percepatan belanja khususnya belanja barang dan modal.

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022							
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL							
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022				ANGGARAN (RUPIAH)
			B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Standar Kemampuan Laboratorium	76	77	79	81	907.230.000
		2. Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	7	9	12	20	6.039.120.000
2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPOMN	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di PPOMN	-	-	-	91	3.071.931.000
3	Meningkatnya laboratorium Balai Besar/Balai POM yang memenuhi standar <i>GLP</i>	4. Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	80	3.599.016.000
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	5. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	76,45	77,80	79,35	82,60	4.463.566.000
		6. Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	72,94	75,22	78,24	81,50	1.844.838.000
5	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	25	50	75	100	2.898.800.000
6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	8. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	93	93	93	17.494.800.000
		9. Indeks Pelayanan Publik PPOMN	-	-	-	4,30	2.776.927.000

7	Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10. Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti secara aktif	50	57	64	71	1.748.069.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPOMN	11. Indeks RB PPOMN	-	-	-	87,6	24.612.148.000
		12. Nilai AKIP PPOMN	-	-	-	78,7	753.000.000
9	Terwujudnya SDM PPOMN yang berkinerja optimal	13. Indeks Profesionalitas ASN PPOMN	-	-	-	86,25	1.251.174.000
10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPOMN	14. Persentase Status Akreditasi	-	-	-	71	497.052.000
		15. Indeks pengelolaan data dan informasi PPOMN yang optimal	-	-	-	2,25	4.480.960.000
11	Terkelolanya keuangan PPOMN yang akuntabel	16. Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	65	75	85	94,1	9.519.040.000


Jakarta, 16 Desember 2021
 KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
 OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN


 Mohamad Kashuri. S.Si. Apt. M.Farm

Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi												
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email												
	TW I			TW II			TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
total_akun_individu	167	167	184	184	183	182						
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1						
total_individu_aktif	122	132	148	130	122	120						
total_individu_login	122	132	148	130	122	120						
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1						
Aspek Login (%)	21,92	23,71	24,13	21,2	20	19,78						
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	40	40	40						
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	21,92	23,71	24,13	21,2	20	19,78						
Perhitungan (%)	83,84	87,42	86,26	82,4	80	79,56						
Perhitungan per TW	83,84	85,63	86,51	85,48	84,38	83,58						
Nilai Indeks	2	2	3	2	2	2						
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC												
	TW I			TW II			TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Akses BOC (%)	30	60	45	60	60	60						
Login BOC (%)	20	40	30	40	40	40						
Total	50	100	75	100	100	100						
Perhitungan per TW	50	75	75	81,25	85	87,5						
Nilai Indeks Per TW	0	2	2	2	2	3						
Nilai Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di BOC												
	TW I			TW II			TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Aktifitas	1	1	1	1	1	1						
Jumlah Frekuensi Verifikasi Data	100	100	100	100	100	100						
Perhitungan (%)	3	3	3	3	3	3						
Nilai Indeks	3	3	3	3	3	3						
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal												
	TW I			TW II			TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Indeks Pemanfaatan	1	2	2,5	2	2	2,5						
Indeks Pemutakhirkan	3	3	3	3	3	3						
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2	2,5	2,75	2,5	2,5	2,75						

Lampiran 4. Surat penyampaian tambahan automatic adjustment TA 2022

 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Jl. Penunjak Nagara No. 23 Jakarta Pusat 10260 Indonesia
Telp. (021) 4244491, 4209221, 4243333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email: halobpom@pom.go.id ; Website: www.pom.go.id

Nomor : B-PR.03.03.2.21.05.22.370 Jakarta, 30 Mei 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Tambahan Automatic Adjustment TA 2022

Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPOM
3. Para Kepala UPT BPOM di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S-456/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, bersama ini kami harapkan seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM baik Unit Pusat maupun UPT BPOM agar dapat melakukan penambahan automatic adjustment (pencadangan anggaran) sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan untuk masing – masing unit kerja (terlampir)

Penambahan automatic adjustment (pencadangan anggaran) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sumber dana Rupiah Murni (RM);
2. Di luar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional;
3. Dapat mencakup Belanja Barang Non Operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022;
4. Dapat mencakup Belanja Modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022;
5. Di luar Kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat dan Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional
6. Belanja non operasional yang rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dananya terdapat di TW 3 dan asumsi kegiatan yang tidak terserap sampai TW 4 :
 - Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan (OBJOK);
 - Belanja Bahan ATK, konsumsi rapat, seminar kit dll ;
 - Perjalanan dinas (Dalam dan Luar Kota);
 - Paket meeting pertemuan (Dalam dan Luar Kota);
 - Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi;
 - Belanja jasa lainnya;
 - Diklat non mandatory.
7. Sisa dana lelang dan/atau swakelola dari belanja barang dan modal.

Penambahan automatic adjustment (pencadangan anggaran) dimaksud dilakukan dengan mencantumkan dalam catatan halaman IV DIPA dan tidak mengurangi volume target RO, sebagaimana telah dilakukan oleh Satuan Kerja dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1058/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 Hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Pelaksanaan penambahan automatic adjustment (pencadangan anggaran) melalui mekanisme revisi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Penambahan....

-2-

Penambahan automatic adjustment dilakukan melalui mekanisme pemblokiran secara mandiri pada aplikasi SAKTI masing – masing Satuan Kerja, dilengkapi data dukung berupa:

1. Surat penyampaian Penambahan automatic adjustment (pencadangan anggaran) dari KPA;
2. Matrika semula menjadi perubahan revisi yang dilakukan (sampai dengan level detail);
3. Matrika semula menjadi form 1 dan 2 aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA; dan
4. RKA Sarker aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA;

Usulan agar disampaikan selambat-lambatnya hari Selasa, 31 Mei 2022 melalui <https://www.files.google.com/view/penganggaranbadanpom/> pada menu Usulan Revisi Anggaran.

Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, Satuan Kerja belum menyampaikan usul penambahan automatic adjustment, maka akan dilakukan blokir untuk penyesuaian pada beberapa akun belanja barang melalui sistem (by system).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Pit. Sekretaris Utama



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa

Tembusan:
Kepala Badan POM RI (sebagai laporan)

Dokumen ini tidak dibagikan secara elektronik menggunakan aplikasi elektronik yang disediakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BSN

Sambungan lampiran 4

MATRIK TAMBAHAN AUTOMATIC ADJUSTMEN TAHUN 2022

No	Satker/Unit Kerja	Total Alokasi Anggaran 2022 (DIPA Awal)	Total Automatic Adjustmen DIPA Awal (Tahap I)	Total Sisa Belanja Non Operasional RM (BB+BM) yang dapat dilakukan penambahan blok (*)	Total Perambahan Automatic Adjustmen (Tahap II) terhadap Sisa Alokasi Belanja Non Operasional (RM)	Total Automatic Adjustmen (Tahap I dan II)	Total Alokasi Anggaran 2022 setelah Tambahan Automatic Adjustmen (**)
a	b	c	d	e	f	g=d+f	h
A	SEKRETARIAT UTAMA	998.971.988.000	20.287.706.000	98.201.517.938	18.969.618.000	98.297.924.000	998.971.988.000
B	DEPUTI I	52.329.994.000	706.846.000	30.485.052.064	6.580.089.000	7.286.885.000	52.329.994.000
C	DEPUTI II	50.004.587.000	1.809.479.000	28.831.897.469	6.540.886.000	6.850.060.000	50.004.587.000
D	DEPUTI III	58.694.540.000	850.654.000	36.150.627.280	7.521.009.000	8.871.563.000	58.694.540.000
E	DEPUTI IV	44.708.170.000	2.179.550.000	32.163.888.291	4.656.088.000	6.836.638.000	44.708.170.000
F	INSPEKTORAT UTAMA	26.901.038.000	842.715.000	11.446.168.917	2.817.068.000	3.659.783.000	26.901.038.000
G	PUSAT - PUSAT	218.717.911.000	13.181.199.000	108.212.646.829	19.971.883.000	38.159.076.000	218.717.911.000
1	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA POM	51.102.191.000	3.577.153.000	30.635.156.013	5.327.782.000	8.904.935.000	51.102.191.000
2	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	54.629.529.000	2.779.014.000	29.415.041.204	4.044.153.000	6.829.367.000	54.629.529.000
3	PUSAT PENGEMBANGAN PENELITIAN OBAT DAN MAKANAN	85.957.671.000	5.631.944.000	21.765.102.145	7.747.641.000	12.979.685.000	85.957.671.000
4	PUSAT RISET DAN LAYAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	24.027.930.000	1.192.282.000	13.946.767.167	3.252.307.000	4.444.589.000	24.027.930.000
H	UPT	1.396.676.723.000	67.577.696.000	591.239.003.180	122.937.961.000	190.516.067.000	1.396.676.723.000
1	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFRI	18.341.627.000	1.283.914.000	9.991.997.639	812.829.000	2.096.743.000	18.341.627.000
2	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	22.014.685.000	1.433.785.000	12.801.800.373	643.320.000	2.077.105.000	22.014.685.000
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	45.606.169.000	2.920.500.000	13.664.476.760	2.346.933.000	5.267.433.000	45.606.169.000
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	59.824.775.000	2.542.957.000	25.122.786.979	2.903.346.000	5.446.303.000	59.824.775.000
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	20.707.370.000	2.374.811.000	21.562.701.729	2.532.821.000	4.295.845.000	20.707.370.000
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	40.612.643.000	1.926.933.000	14.643.529.853	1.939.288.000	4.296.212.000	40.612.643.000
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	56.083.984.000	892.258.000	21.878.171.849	2.795.188.000	3.687.444.000	56.083.984.000
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	25.436.317.000	1.673.671.000	6.572.608.472	1.013.757.000	2.687.426.000	25.436.317.000
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	46.138.392.000	2.076.923.000	20.997.624.379	1.970.268.000	4.047.191.000	46.138.392.000
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	44.205.615.000	1.491.506.000	19.833.546.570	2.589.690.000	4.051.204.000	44.205.615.000
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	35.553.360.000	1.763.252.000	11.983.482.092	2.623.575.000	4.386.827.000	35.553.360.000
12	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	30.049.871.000	1.749.147.000	13.566.961.821	818.568.000	2.087.715.000	30.049.871.000
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	20.567.100.000	1.474.801.000	10.134.799.357	876.188.000	1.700.970.000	20.567.100.000
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	34.513.577.000	2.202.437.000	14.932.852.640	2.210.182.000	4.412.619.000	34.513.577.000
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	26.713.626.000	1.290.499.000	10.764.630.639	2.246.296.000	3.476.795.000	26.713.626.000
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	28.070.532.000	1.397.899.000	12.617.422.780	2.501.964.000	3.899.863.000	28.070.532.000
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	62.212.840.000	3.154.828.000	42.773.305.092	761.100.000	3.915.928.000	62.212.840.000
18	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LAMARINDA	32.711.174.000	1.630.575.000	14.187.663.416	2.224.516.000	3.855.091.000	32.711.174.000
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAJALINGGA	32.068.897.000	1.432.463.000	9.425.959.866	1.052.732.000	2.465.195.000	32.068.897.000
20	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANGDAERAH	25.834.138.000	1.734.781.000	10.134.799.357	876.188.000	1.700.970.000	25.834.138.000
21	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	56.353.243.000	2.539.408.000	25.003.956.341	3.121.891.000	5.655.299.000	56.353.243.000
22	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	33.472.032.000	1.601.338.000	17.073.506.793	6.300.000.000	7.981.338.000	33.472.032.000
23	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	23.670.173.000	1.167.086.000	6.125.843.890	1.003.101.000	2.170.987.000	23.670.173.000
24	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	42.928.388.000	2.028.276.000	16.460.940.625	3.082.259.000	5.110.535.000	42.928.388.000
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	29.577.280.000	1.465.653.000	9.657.322.162	1.075.514.000	2.541.167.000	29.577.280.000
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	34.488.498.000	1.481.638.000	16.492.497.870	2.586.348.000	4.077.881.000	34.488.498.000
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SATAYAJAYA	28.778.331.000	1.809.746.000	9.602.115.015	2.164.782.000	4.028.288.000	28.778.331.000
28	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKALU	28.661.120.000	1.344.893.000	10.701.021.233	2.000.000.000	3.341.801.000	28.661.120.000
29	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SERANG	26.226.462.000	1.398.845.000	8.978.000.355	1.081.069.000	2.479.914.000	26.226.462.000
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	31.729.289.000	1.576.565.000	15.978.844.620	200.000.000	1.776.565.000	31.729.289.000
31	LOKA POM DI KOTA SURABAYA	5.296.346.000	375.410.000	1.127.238.256	205.980.000	481.390.000	5.296.346.000
32	LOKA POM DI KOTA TANGERANG	6.096.857.000	317.036.000	2.261.058.191	408.482.000	725.518.000	6.096.857.000
33	LOKA POM DI KABUPATEN KEJURI	4.246.735.000	220.830.000	895.801.041	217.265.000	438.095.000	4.246.735.000
34	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI FANGKAL PINANG	20.982.130.000	1.033.911.000	9.404.329.027	2.332.305.000	3.366.736.000	20.982.130.000
35	LOKA POM DI KABUPATEN BANGKALU	4.059.282.000	262.128.000	1.271.845.171	259.882.000	502.110.000	4.059.282.000
36	LOKA POM DI KABUPATEN BANTUL	5.040.938.000	267.128.000	1.721.845.171	259.882.000	502.110.000	5.040.938.000
37	LOKA POM DI KOTA PALOPO	5.018.555.000	260.965.000	1.741.102.888	441.718.000	702.683.000	5.018.555.000
38	LOKA POM DI KABUPATEN BOJONEgara	4.903.984.000	255.007.000	1.140.358.334	203.847.000	458.954.000	4.903.984.000
39	LOKA POM DI KABUPATEN TANGGAMBORA	4.763.976.000	247.726.000	1.109.314.778	201.433.000	449.159.000	4.763.976.000
40	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	7.911.548.000	-	3.362.822.939	-	-	7.911.548.000
41	LOKA POM DI KOTA DUMAI	5.091.155.000	264.740.000	1.848.997.871	397.004.000	501.744.000	5.091.155.000
42	LOKA POM DI KOTA BAKUR	5.645.698.000	293.376.000	2.110.574.472	373.453.000	669.028.000	5.645.698.000
43	LOKA POM DI KOTA LISULUNGGAU	4.405.498.000	229.086.000	1.370.274.136	147.639.000	324.225.000	4.405.498.000
44	LOKA POM DI KABUPATEN MAMUKA	5.069.227.000	263.131.000	1.855.002.832	330.614.000	593.745.000	5.069.227.000
45	LOKA POM DI KABUPATEN ENJONG	5.447.910.000	289.260.000	1.972.081.730	307.226.000	590.486.000	5.447.910.000
46	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	13.004.797.000	676.249.000	9.485.593.704	6.933.000.000	7.628.249.000	13.004.797.000
47	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	19.986.599.000	984.478.000	7.677.840.941	1.487.754.000	2.472.182.000	19.986.599.000
48	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MARIKOWARI	34.220.650.000	1.704.845.000	21.305.523.762	12.369.205.000	14.074.050.000	34.220.650.000
49	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.491.105.000	181.537.000	394.612.591	40.853.000	272.390.000	3.491.105.000
50	LOKA POM DI KOTA TENGAH	6.921.633.000	353.367.000	3.221.947.280	4.483.083.000	2.729.367.000	6.921.633.000
51	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	3.602.828.000	187.347.000	1.128.927.509	201.409.000	388.756.000	3.602.828.000
52	LOKA POM DI KOTA PANGKALANBUNEH	6.734.168.000	350.176.000	3.756.322.349	2.200.000.000	2.550.176.000	6.734.168.000
53	LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENIH	4.034.348.000	209.786.000	1.075.133.159	52.761.000	262.547.000	4.034.348.000
54	LOKA POM DI KABUPATEN TULANGAWANG	4.780.480.000	248.585.000	1.975.748.417	1.020.685.000	1.269.270.000	4.780.480.000
55	LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU	3.869.372.000	201.207.000	978.940.905	178.357.000	379.564.000	3.869.372.000
56	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	4.182.867.000	217.509.000	946.697.304	170.177.000	387.686.000	4.182.867.000
57	LOKA POM DI KABUPATEN BUKIT SUKSES UTARA	3.862.676.000	200.859.000	1.014.654.640	187.418.000	388.276.000	3.862.676.000
58	LOKA POM DI KOTA SAKUR PAPAN	4.226.588.000	219.792.000	1.200.691.077	114.613.000	324.225.000	4.226.588.000
59	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGHE	4.484.194.000	233.178.000	1.302.909.450	305.176.000	538.356.000	4.484.194.000
60	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	3.603.510.000	187.382.000	990.086.519	181.185.000	368.567.000	3.603.510.000
61	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	28.387.142.000	1.475.091.000	28.915.383.760	19.500.000.000	20.975.091.000	28.387.142.000
62	LOKA POM DI KABUPATEN BINA	4.244.097.000	220.693.000	1.146.985.901	210.990.000	431.683.000	4.244.097.000
63	LOKA POM DI KABUPATEN BERAIKUE	3.690.198.000	191.890.000	1.161.314.392	214.625.000	406.515.000	3.690.198.000
64	LOKA POM DI KABUPATEN BEJANGLEBONG	9.814.574.000	510.357.000	6.819.025.809	5.300.000.000	5.810.357.000	9.814.574.000
65	LOKA POM DI KABUPATEN BUKIT SUKSES SELATAN	4.518.592.000	244.862.000	1.588.365.228	283.505.000	320.363.000	4.518.592.000
66	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	3.625.292.000	188.515.000	785.787.157	81.892.000	270.407.000	3.625.292.000
67	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	5.423.941.000	282.045.000	2.122.055.340	1.100.000.000	1.382.045.000	5.423.941.000
68	LOKA POM DI ACEH SELATAN	7.671.026.000	396.893.000	4.511.267.409	2.500.000.000	2.898.893.000	7.671.026.000
69	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4.171.920.000	176.939.000	1.789.890.533	213.707.000	430.646.000	

Lampiran 5. Hasil SKM 2022

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT II
NOTA DINAS

No. PI.06.07.72.721.09.22.351

Yth. : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Dari : Plt. Inspektur II
Hal : Penyampaian Ralat Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022
Tanggal : 28 September 2022

Sehubungan dengan surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.71.06.22.87 tanggal 29 Juni 2022 perihal Permintaan Pemutakhiran Data Perkembangan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan ralat nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 pada aplikasi SAPA APIP, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Layanan Publik	Target Responden	Pemenuhan Responden	Nilai SKM 2022 Per Layanan		Nilai SKM 2022	
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	Penjualan Hewan Uji	21	Terpenuhi	89,59	89,59	93,21	92,64
2	Penjualan Baku Pembanding Farmakope Indonesia	83	Terpenuhi	91,94	91,94		
3	Jasa Pengujian	20	Terpenuhi	95,00	95,00		
4	Kultur Bakteri	13	Terpenuhi	95,30	95,30		
5	Jasa Kalibrasi	2	Terpenuhi	100,00	100,00		
6	Jasa Uji Profisiensi	13	Terpenuhi	86,42	84,14		
7	Pelatihan	19	Terpenuhi	99,81	99,81		

Perubahan nilai SKM tersebut disebabkan karena *system error* aplikasi SAPA APIP yaitu target responden pada layanan Jasa Uji Profisiensi sebanyak 13 responden namun yang dihitung oleh aplikasi sebanyak 3 responden. Penurunan nilai SKM tersebut tidak mengubah kategori penilaian, tetap mendapatkan kategori A (Sangat Baik).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ali Yudhi Hartanto

Tembusan:
Inspektur I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 6. Penilaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022

**BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022**

Pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4,77/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	1.a.P	Agar dalam pelaksanaan dan pelaporan FKP mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan UPP, antara lain keterlibatan unsur-unsur masyarakat yang dibuktikan dalam Berita Acara.
		1.a.Ak	Agar mensosialisasikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui berbagai metode dan media publikasi untuk menjangkau pengguna layanan secara lebih luas.
2	Profesionalisme SDM	2.e.K1	Pemberian reward/penghargaan sebaiknya dapat dilaksanakan perbulan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan
3	Sarana Prasarana	Semua Indikator Telah Terpenuhi	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Semua Indikator Telah Terpenuhi	
5	Konsultasi dan Pengaduan	Semua Indikator Telah Terpenuhi	
6	Inovasi	Semua Indikator Telah Terpenuhi	

Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
4.51 - 5.00	A	Pelayanan Prima
4.01 - 4.50	A-	Sangat Baik
3.51 - 4.00	B	Baik
3.01 - 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2.51 - 3.00	C	Cukup
2.01 - 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1.51 - 2.00	D	Buruk
1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
0.00 - 1.00	F	Gagal